

**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK
WARGA NEGARA INDONESIA OLEH
WARGA NEGARA ASING**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUH. IRFANDI SYUKUR

NIM : 10500112098

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Irfandi Syukur, S.H
NIM : 10500112098
Tempat : Makassar, 04 Maret 1994
Jurusan/Konsentrasi : Ilmu Hukum, Hukum Perdata
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Barukang No. 6 B Makassar
Judul Skripsi : “ Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing “

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan hasil duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 29 November 2016

Penyusun,

MUH. IRFANDI SYUKUR, S.H

NIM: 10500112098

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing”, yang disusun oleh saudara Muh. Irfandi Syukur, NIM: 10500112098, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari selasa, tanggal 29, bertepatan dengan yudisium dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 29 November 2016

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Rahman Syamsuddin, S.H, M.H	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, MA.	(.....)
Munaqisy II	: Ashabul Kahfi, S.Ag, M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M. Thahir Maloko, M.HI	(.....)
Pembimbing II	: Erlina, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

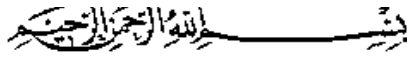
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP. 195704141986031003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad swt. yang telah membawa umat ke jalan Dineul Islam. Beliau adalah hamba Allah swt yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kejahilan gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada beliau, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu di jenjang perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu serta Saudara-Saudaraku yang saya hormati dan saya sayangi. Bapakku H. Abd. Syukur Saleh dan Almh Ibuku Hj. Sohra dan Ibu Tiriku Ramlah tercinta, terkasih dan tersayang. Terima kasih penulis

ucapkan kepada beliau semua yang telah membimbing, mencintai, memberi semangat, harapan, arahan dan motivasi serta memberikan dukungan baik secara materiil maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

2. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. M. Thahir Malloko, M,HI, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Erlina, S.H, M.H. selaku dosen pmbimbing II skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga Beliau beserta seluruh anggota keluarga besar selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan oleh Allah SWT. Amin Ya Robbal ‘Alamin.
5. Ibu Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan semua mata kuliah dan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat. Amin.
7. Bapak Hakim dan Pegawai Bagian Kemahasiswaan Pengadilan Negeri Makassar yakni Bapak Baso Rasyid, SH.,MH selaku hakim narasumber penelitian saya dan Bapak Mustari., SH selaku Pegawai Bagian Kemahasiswaan yang telah memberikan fasilitas waktu, tempat dan bantuannya selama penelitian dan semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil.

8. Semua teman-temanku pada Ilmu Hukum, Khususnya Ilmu Hukum 2012 yang saya sayangi dan saya cintai yang telah membantu selama perkuliahan sampai sekarang ini, yang namanya tak sempat saya sebutkan satu demi satu. Teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2012 yang telah membantu, memberikan semangat kepada penulis.
9. Teman-teman KKN Reguler, khususnya teman-teman KKN Reguler angkatan 51 yang selalu memberikan inspirasi kepada penulis untuk semangat berjuang dengan kekuatan kebersamaan dan persaudaraan.
10. Sahabat-sahabat ku yang jauh di mata namun dekat di hati yang selalu mendoakan, dan terkhusus buat Salma Ramadhani Sassan memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, teriring do'a kepada Allah swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Makassar, 21 November 2016

Penulis,

MUH. IRFANDI SYUKUR
NIM. 10500112098

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv-vi
DAFTAR ISI.....	vii-viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-16
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	17-53
A. Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak.....	17
B. Pengertian Orang Tua Angkat.....	23
C. Tujuan dan Motif Pengangkatan Anak.....	24
D. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak.....	26
E. Jenis Pengangkatan Anak.....	28
F. Persyaratan Calon Anak Angkat (CAA) dan Calon Orang Tua Angkat (COTA).....	38
G. Lembaga Pengangkatan Anak.....	41
H. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak PUSAT (Tim PIPA PUSAT).....	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54-58
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian.....	55
C. Sumber Data	56
D. Metode Pengumpulan Data	57
E. Teknik Pengelohan dan Analisis Data.....	58
F. Instrumen Penelitian.....	58
G. Teknik Pengelohan dan Analisis	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59-98
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
B. Proses Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing.....	60
C. Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing	90
BAB V PENUTUP	99-100
A. Kesimpulan.....	99
B. Implikasi Penelitian.....	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Muh. Irfandi Syukur

NIM : 10500112098

Judul : Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dimimpikan oleh setiap pasangan. Pasangan yang tidak mempunyai keturunan biasanya melakukan pengangkatan anak dengan tujuan melanjutkan garis keturunannya dan mempertahankan perkawinannya. Pengangkatan anak yang dilakukan di Indonesia adalah pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*) dan pengangkatan anak oleh warga negara asing (*Intercountry adoption*). Persyaratan dan prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, kedua peraturan tersebut tidak terlepas pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan peraturan tersebut perlu diteliti bagaimana proses pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing dan akibat hukum bagi anak warga negara Indonesia setelah adanya putusan pengadilan.

Permasalahan tersebut dikaji dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui data primer yang berupa wawancara dan data sekunder berupa studi dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Sebelum mendapatkan putusan dari Pengadilan, Calon Orang Tua Angkat harus memenuhi semua persyaratan baik material maupun administratif, serta telah mendapat Surat Rekomendasi dari Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pengangkatan anak ini menimbulkan akibat hukum khususnya dalam status kewarganegaraan anak, kewarisan, dan perwalian.

Disarankan kepada Pemerintah untuk lebih selektif dalam pemberian ijin pengangkatan anak kepada warga negara asing, perlu adanya Lembaga Pengawasan Anak untuk memantau perkembangan anak angkat, serta perlunya diadakan sosialisasi tentang prosedur dan akibat hukum yang terjadi setelah dilakukannya pengangkatan anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berpasangan, sama halnya dengan manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Manusia diciptakan untuk saling melengkapi, karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan keberadaan manusia lain. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk saling berpasang-pasangan, dengan naluri tersebut manusia menginginkan sebuah komunitas kecil yaitu keluarga, sehingga manusia harus melangsungkan sebuah perkawinan untuk membentuk komunitas tersebut.

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Sidi Gazalba bahwa tidak merupakan perkawinan andaikata ikatan lahir batin tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Setiap manusia yang memutuskan untuk melaksanakan perkawinan pada umumnya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuannya untuk mendapatkan seorang anak (keturunan) yang sah untuk melanjutkan garis keturunannya. Dengan kehadiran anak sebagai penerus bagi keturunan diharapkan

¹Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 44.

dapat menambah kebahagiaan pasangan suami isteri dalam komunitas kecilnya. Alasan memperoleh keturunan ini yang sering dijadikan alasan utama mengapa seorang pria dengan wanita memutuskan untuk membentuk keluarga. Meskipun memperoleh keturunan bukanlah satu-satunya alasan membentuk perkawinan namun pada praktik ketidakhadiran seorang anak (keturunan) menjadi alasan ketidaksempurnaan sebuah keluarga, dan sering menjadi alasan putusnya sebuah perkawinan (perceraian), untuk mencegah putusnya perkawinan karena ketidakhadiran keturunan, maka dilakukanlah pengangkatan anak.

Anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orang tuanya telah meninggal dunia.² Anak menurut pikiran orang berakal sehat adalah buah hati yang dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunan, mengikat melampiaskan curahan kasih sayang manusiawinya. Namun, terkadang Tuhan belum berkehendak memercayakan amanah tersebut kepada sebagian orang yang begitu menginginkan kehadirannya.

Dalam pandangan umum, keluarga yang sempurna terdiri atas ayah, ibu, dan adanya anak. Dengan demikian, keberadaan anak dalam keluarga merupakan suatu unsur penting sempurnanya suatu keluarga.³ Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang

²Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2011), h. 1.

³Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 2.

belum dikarunia anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat.

Djaja S. Meliala menyebutkan bahwa seseorang melakukan pengangkatan anak karena latar belakang sebagai berikut:⁴

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
2. Tidak mempunyai anak dan keinginan mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
6. Ingin mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.

Pengertian pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.⁵

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang materinya mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu:

⁴Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia* (Bandung : Tarsito, 1982), h. 4

⁵Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama* (Jakarta: Akademi Pressindo,1989), h. 44.

- a. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- b. Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- c. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar ada dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adopsi adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seorang terhadap anak yang jelas nasabnya, lalu anak itu dia nasabkan kepada dirinya. Sedangkan syariat Islam, anak adopsi tidak mendapatkan warisan, dikarenakan bahwa adopsi tidak mengubah nasab seorang anak. Kebiasaan mengadopsi anak adalah tradisi yang sudah ada sejak jaman Jahiliyah dan dibenarkan di awal kedatangan Islam Bahkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri melakukannya, ketika beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengadopsi Zaid bin Haritsah *radhiyallahu 'anhu* sebelum beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* diutus Allah *Ta'ala* sebagai nabi, kemudian Allah *Ta'ala* menurunkan larangan tentang perbuatan tersebut dijelaskan pada, QS al-Ahzab/33: 4-5 : sebagai berikut:

مَّا جَعَلَ لِلَّهِ، مِّنْ فَلَانٍ فِي جَوْمٍ مَّقْدَعٍ أَرْزَ وَأَجْزَمٌ لَّا يُنْظَرُونَ
 أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ
 لِدَقِّقٍ وَهُوَ هَدِيْلَسَدِيْلٍ دَعْوَاهُمْ بَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ لَمْ تَعْلَمُوا
 ءَابَاءَهُمْ فَاِذْ ذَٰلِكَ نَكُحْنُ الْمُكِنِّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
 وَلَا كِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Terjemahnya:

”Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak

kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar) (4) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka: Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (5)”⁶

Orang-orang Arab di masa jahiliyah dan begitu juga bangsa-bangsa lainnya banyak yang menisbatkan orang lain dengan nasabnya dengan sesukanya, dengan jalan mengambil anak angkat. Realitas itulah yang ditentang dalam islam. Dalam islam, seorang laki-laki boleh memilih anak-anak kecil untuk dijadikan anak, kemudian diproklamirkan. Maka, si anak tersebut menjadi satu dengan anak-anaknya sendiri dan satu keluarga, sama-sama senang dan sama-sama susah, memiliki hak-hak yang sama, terkecuali dalam soal warisan, kemahroman, batasan melihat, dan memperlihatkan aurat, dan hak perwalian nikah. Mengangkat seorang anak seperti ini sedikit pun tidak dilarang. Kendati anak yang diangkat itu jelas-jelas mempunyai ayah yang mungkin sudah wafat sehingga menjadi yatim, atau hidup tapi tak mampu mengasuhnya, dan nasabnya pun sudah dikenal. Islam datang, sedang masalah pengangkatan anak ini tersebar luas di masyarakat Arab, sehingga Nabi Muhammad sendiri mengangkat seorang anak, yaitu Zaid bin Haritsah sejak zaman jahiliyah. Zaid waktu itu seorang anak muda yang ditawan sejak kecil dalam salah satu penyerbuan jahiliyah, yang kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam untuk diberikan kepada bibinya yang bernama Khodijah, dan selanjutnya diberikan oleh Khodijah kepada Nabi Muhammad saw. sesudah beliau menikah dengannya. Selanjutnya Zaid bin Haritsah telah dinikahkan dengan

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 334.

Zainab binti Jahsy, sepupu dari Nabi sendiri dan Zaid ia termasuk budak yang pertama kali masuk islam.

Imam Ibnu Katsir berkata, “Sesungguhnya ayat ini turun (untuk menjelaskan) keadaan Zaid bin Haritsah ra. bekas budak Rasulullah saw. Sebelum diangkat sebagai Nabi, Rasulullah saw. mengangkatnya sebagai anak, sampai-sampai dia dipanggil “Zaid bin Muhammad” (Zaid putranya Muhammad saw.), maka Allah Ta’ala ingin memutuskan pengangkatan anak ini dan penisbatannya (kepada selain ayah kandungnya) dalam ayat ini, sebagaimana juga Firman Allah Ta’ala dalam QS Al-Ahzab 33:40.

كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٤٠

Terjemahnya:

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”⁷

Dari ayat tersebut memberikan gambaran yang sangat signifikan dalam hal ini teksnya tidak menyatakan pelanggaran adopsi, namun menganjurkan kata “anak” atau “nak” dengan menghargai kepada anak angkat hanya frasa bukan fakta darah daging melainkan hanya untuk memuliakan dan kasih sayang dan ini diperbolehkan di dalam Islam karena Rasulullah saw. sendiri melakukannya, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis yang shahih, di antaranya:

Di dalam hadis dari Abdullah bin Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, dia berkata:

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 337

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
 سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَيْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَغِيلَمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ يَلَطُّحُ أَفْحَاذَنَا وَيَقُولُ أَبْنِي لَا تَرْمُوا جُمَةً
 الْعَقَبَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri’], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Sufyan Atas Tsauri] dari [Salamah bin ‘Uruni] dari [Ibnu Abbas], ia berkata; Rasulullah saw., mengutus kami yaitu anak-anak Bani Abdul Muththalib diatas beberapa ekor keledai, beliau memukul pelan paha kami dan bersabda: “Wahai anak-anakku, jangan melempar jumrah Aqabah hingga matahari terbit.”⁸

Anak angkat bukanlah mahram sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun anak-anak kandung mereka untuk memakai hijab yang menutupi aurat di depan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di depan orang lain yang bukan mahram dan menampakkan aurat kepada mahram dikecualikan jika anak orang lain tersebut adalah anak susuannya. Alasannya adalah karena anak susuan memiliki perlakuan yang sama dalam hal tersebut dengan anak kandung.

Demikian pula kisah Sahlah binti Suhail (istri Abu Hudzaifah) radhiyallahu 'anhaa ketika Salim bin Ma'qil (bekas budak Sahlah yang diambil anak oleh Abu Hudzaifah) sudah dewasa dan sering masuk ke rumah mereka, kemudian mereka merasa tidak enak dengan keberadaan Salim, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh Sahlah untuk menyusui Salim supaya menjadi anak susuannya (dan ini adalah kekhususan Sahlah ketika menyusui Salim) seraya bersabda

أَرْضِعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ

⁸ Abdullah bin Muhammad, ringkasan shahi muslim Kitab, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012)

Artinya:

"Susuilah dia maka dia menjadi haram atasmu (menjadi mahram)" (HR. Muslim)⁹

Hadist ini menunjukkan bahwa Salim radhiyallahu 'anhu tidak langsung menyusui dari Sahlah karena saat itu dia bukan mahram Sahlah, ini menunjukkan bahwa meminum ASI secara tidak langsung hukumnya sama dengan meminum langsung.

Salah satu contoh yang dapat dilihat yaitu kasus Zaid bin Haritsah, dimana dia adalah hasil rampasan perang yang diberi oleh Hakim bin Hizham setelah itu ia menghadiahkannya Zaid kepada Rasulullah saw. Tidak berselang lama kemudian ayah Zaid datang untuk membeli/menebus anaknya, Zaid diberikan pilihan oleh Rasulullah apakah memilih Rasul atau ayahnya akan tetapi ternyata Zaid memilih rasul dan sejak itu Zaid di panggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Hal inilah yang menyebabkan turunnya ayat 5 surah al-Ahzab yang melarang untuk menasabkan anak yang diangkat kedalam keluarga ayah angkatnya.¹⁰

Pengangkatan anak bukanlah hal baru di Indonesia, karena sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Pengertian anak angkat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah:

⁹ Abdullah bin az-Zubair, ringkasan shahi bukhari Kitab, *an-Nikaah* (Bandung: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012)

¹⁰ Muhammad Jamaluddin Al Qasimi, *Tafsir al Qasimi mahaasinutta'wil*, Juz XIII (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 222.

“Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa :

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum karena harus melalui proses hukum dan adanya penetapan hakim di pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh beberapa pasang suami isteri bukan hanya berasal dari anak yatim piatu saja, ada juga yang melakukan pengangkatan anak terhadap anak-anak di kalangan keluarga. Hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, sama dengan hubungan orang tua dengan anak kandung. Jumlah anak yang diangkat tidak terbatas, sesuai dengan kemampuan seseorang untuk memelihara dan menjamin kelangsungan hidup anak angkat tersebut. Pada umumnya setiap anak memiliki hak dan kewajiban sebagai anak dalam suatu keluarga, tetapi hak-hak anak sering terabaikan karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan.

Pengangkatan anak biasa dilakukan antar warga negara Indonesia, akan tetapi karena kesempatan kepada orang asing lebih terbuka maka hal ini menimbulkan niat bagi warga negara asing untuk mengangkat warga negara Indonesia, walaupun pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*) tetapi tidak mengurungkan niat para warga negara asing untuk tidak mengangkat anak dari Indonesia.

Pengangkatan anak yang terjadi sering kita ketahui dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan namun tidak jarang juga dilakukan dengan *illegal* yaitu melalui perdagangan bayi seperti yang kita lihat di berbagai media massa.

Jenis pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal (7) yang menyebutkan bahwa:

“Pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan anak antar warga negara Indonesia, dan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing”.

Dengan makin bertambahnya kesempatan kepada bangsa kita dengan orang-orang asing maka semakin banyak terjadi pengangkatan-pengangkatan anak Indonesia oleh orang-orang asing yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak antar negara (*Intercountry Adoption*) dan semuanya dimintakan pengesahannya kepada pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan memiliki prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Proses pengangkatan anak oleh warga negara asing (*Intercountry Adoption*) tidaklah sama dengan proses pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.

Pengangkatan anak antar warga negara bisa dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tertentu walaupun pada dasarnya haruslah tetap memerlukan suatu penetapan yang sah dari pengadilan untuk status anak angkat di kemudian hari. Sedangkan, pengangkatan anak terhadap warga negara Indonesia oleh warga negara asing harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak atau Yayasan Panti Asuhan yang ditunjuk oleh Departemen Sosial untuk melakukan *Intercountry Adoption*.

Pengangkatan anak dilakukan oleh Lembaga Pengasuhan Anak dan diatur dalam ketentuan umum angka 6 Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial yang menyatakan bahwa :

“Organisasi Sosial/Lembaga Sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum yang menangani pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Dinas Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial sebagai penyelenggara pengangkatan anak”.

Sehingga proses pengangkatan anak tersebut berbeda dengan proses pengangkatan anak antar warga negara yang bisa dilakukan berdasarkan kebiasaan yang terdapat di daerah tertentu, walaupun dalam beberapa hal terdapat proses yang sama dalam memperoleh hubungan hukum yang sah antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Setiap perbuatan hukum pasti memiliki akibat hukum. Demikian terhadap pengangkatan anak yang akhirnya akan memperoleh hubungan hukum yang baru. Dimana jelas dalam Undang-Undang telah disebutkan tentang syarat dan proses pengangkatan anak yang sah. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing yang lebih dikenal dengan *Intercounty Adoption* ini memiliki proses pengangkatan yang lebih sulit dan rumit dari pengangkatan anak pada umumnya. Calon anak angkat harus berada di lembaga pengasuhan anak, dengan kata lain anak yang akan diangkat oleh warga negara Asing tidak boleh diserahkan langsung oleh orang tua kandung si anak. Sehingga berdasarkan permasalahan yang timbul akibat pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing sangatlah menarik untuk diteliti lebih jauh berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan proses secara langsung di lapangan.

Dalam uraian latar belakang tersebut, hal tersebut menarik untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam

bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus pada penelitian ini adalah pada pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa pengertian kata dan istilah yang terdapat dalam skripsi ini.

Kata “Tinjauan Yuridis” menurut Kamus Bahasa Indonesia, tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan atau pendapat yang diuraikan setelah menyelidiki dan mempelajari sesuatu.¹¹ Tinjauan juga dapat diartikan sebagai pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Sedangkan yuridis menurut bahasa adalah menurut hukum dan secara hukum.¹² Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau di mata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan memeriksa dan mengumpulkan data secara teliti, sistematis dan objektif serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

Kata “Pengangkatan Anak” adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri,

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1529.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1629.

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.¹³

Kata “Warga Negara Indonesia” adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.¹⁴

Kata “warga negara asing” adalah warga negara asing yang menetap di Indonesia dan tidak terdaftar sebagai warga negara Republik Indonesia.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing ?

¹³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 44

¹⁴ “Warga Negara Indonesia”, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Warga_Negara_Indonesia (10 Agustus 2016).

¹⁵ “Warga Negara Asing”, <https://www.bimbingan.org/pengertian-wna.htm>. (10 Agustus 2016).

D. *Kajian Pustaka*

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa buku yang dimana didalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli. Adapun beberapa literatur yang di dalamnya membahas tentang pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing adalah sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)” yang disusun oleh Fransiska Hildawati Tambunan.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang proses pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Sebelum mendapatkan putusan dari Pengadilan, calon orang tua angkat harus memenuhi semua persyaratan baik material maupun administratif, serta telah mendapat Surat Rekomendasi dari Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pengangkatan anak ini menimbulkan akibat hukum khususnya dalam status kewarganegaraan anak.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing” yang disusun oleh Liely Hana ningsih.¹⁷ Skripsi ini membahas akibat hukum pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, Pertama maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orang tua kandung

¹⁶ Fransiska Hildawati Tambunan, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013).

¹⁷ Liely Hananingsih, “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing” *Skripsi* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014).

dan anak tersebut. Kedua dalam status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraanya, dan pernyataan tersebut harus tertulis dan disampaikan ke Pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen yang sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan dan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Djaja S. Meliala dalam bukunya yang berjudul Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia. Dalam buku ini menguraikan mengenai proses pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing begitupun sebaliknya, landasan hukum pengangkatan anak di Indonesia, tata cara pengangkatan anak dan akibat hukum pengangkatan anak dari segi hubungan hukum dengan orang tua kandung, perwalian, pewarisan dan kewarganegaraan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui prosedur pelaksanaan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum yang akan terjadi terhadap anak angkat setelah adanya proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing.

2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

- a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi dalam hal ilmiah tentang pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara Asing, serta akibat hukum terhadap anak angkat

- b. Kegunaan Praktis

Bagi setiap orang yang ingin mengangkat seorang anak khususnya kepada warga negara asing atau suami isteri yang tidak memiliki anak yang berkeinginan untuk mengangkat anak warga negara Indonesia, dapat memberikan informasi dalam mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak yang bertujuan untuk kepentingan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” dalam bahasa Belanda atau “*adoption*” dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak yaitu “*adoption of child*.”¹⁸

Dalam QS al-Ahzab ayat/33:5 Allah swt. telah menjelaskan kepada kita umat manusia tentang anak angkat ini sebagai berikut:

دَعُوا لَهُمْ آبَاءَهُمْ هُوَ أَقْسَطُ فَعَلِمَ اللَّهُ نِعْمَ أَعْلَمُوا ۖ أَبَاءَهُمْ ۖ فَأِذَا وَالْكُفْمَ فِي
وَمَوَالِيكُمۡ وَلَيْسَ عَلَيْكُمۡ جُنَاحٌ فِيمَا أَخَذْتُم بِوَالِكِن تَعَمَّدَت ۖ فُلُوبُكُمۡ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Terjemahnya:

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang¹⁹

Dalam ayat ini Allah swt. melarang hambanya apabila telah mengangkat anak kemudian memanggil anak tersebut dengan menisbatkan kepada diri, selaku ayah angkatnya melainkan harus dinisbatkan kepada orang tua kandung anak angkat tersebut. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya pengangkatan anak

¹⁸Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1981), h. 13.

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 334

menurut hukum islam tidak menghilangkan nasab seseorang dengan orang tua kandungnya melainkan yang beralih dalam pengangkatan anak adalah tanggung jawab ayah kandung kepada ayah angkat dalam hal kasih sayang, pendidikan dan pemenuhan atas segala kebutuhannya²⁰. Dari uraian tersebut maka sudah jelas bahwa dalam hukum islam pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan saudara-saudara kandung mereka (anak-anak angkat tersebut), disebabkan anak tersebut telah diangkat sebagai anak orang lain.

Menurut terminologi, adopsi diartikan anak angkat yaitu, “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”. Dari segi perkembangan hukum nasional, rumusan pengertian pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter-country adoption* dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP No 54 Tahun 2007). Menurut Pasal 1 butir 2 Pengangkatan Anak bahwa Pengangkatan anak adalah:

“Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Pengangkatan anak dengan demikian suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) kelingkungan keluarga orang tua angkatnya. Dari rumusan pengertian pengangkatan ini tidak cukup tercermin sampai berapa jauh atau seberapa luas akibat hukum perbuatan pengangkatan anak.

²⁰ H. Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I: Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 156.

PP Pengangkatan Anak diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak sendiri tidak merumuskan pengertian 'Pengangkatan Anak'. UU Perlindungan Anak hanya merumuskan pengertian anak angkat. Anak Angkat menurut Pasal 1 butir 9 UU Perlindungan Anak adalah:

“Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pemsaraan anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.²¹ Anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami isteri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.²² Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami isteri namun diambil, dipelihara dan perlakuan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.²³

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa 2008), h.31.

²² Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.32

²³ Juli Astuti, “Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Adat di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar”, *Thesis* (Program Pasca-Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang. 2004), h. 20.

tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Selain itu ada definisi anak angkat dikemukakan oleh beberapa para ahli :

1. Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.
2. Menurut Surojo Wignodipuro Anak angkat (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang tua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.²⁴
3. Menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. ia diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan nashabnya sendiri.²⁵
4. Menurut M. Djojodiguno dan R.Tirtawinata, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.²⁶

²⁴ Surojo Wignodipuro, *Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Kinta, 1972), h.14.

²⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Bina Akasara, 1985), h.85.

²⁶ M. Djojodiguno dan R. Trtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Semarang: Bumi Aksara, 1990), h.34.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa anak angkat adalah upaya mengalihkan hak dan kewajiban anak yang berasal bukan dari keturunan asli untuk dijadikan sebagai anggota keluarga sendiri, sehingga hak dan kewajibannya beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak kandung.

Dari segi terminologi, ada beberapa pengertian adopsi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Wahbah Al-Zuhaili sebagaimana dikutip Andi Syamsu dan M. Fauzan dalam buku Hukum Pengangkatan anak dalam perspektif Islam, “Tabanni” adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.²⁷ Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandung sendiri. Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *literlijk*, yaitu adopsi diserap ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

Menurut pendapat seorang Sarjana Hukum Belanda yang khusus mempelajari tencang pengangkatan anak, yaitu J.A. Nota yang dikutip oleh Purnadi Perbotjaroko dan Soerjono Soekanto memberi rumusan, bahwa adopsi adalah suatu lembaga hukum (*eer.rechtsinstelling*) melalui mana seorang berpindah kedalam ikatan keluarga yang baru sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan-hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.

Beberapa jenis pengangkatan anak, yaitu:

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqih al-Islami wa al-adillathu*, Juz 9 (Beirut: Daral Fikr al-Ma’ashir, 1989), h. 271

1. Pengangkatan anak sempurna, yaitu pengangkatan seorang anak dengan tujuan untuk memutuskan hubungan kekeluargaan seorang anak dengan keluarga semula dan dengan mengadakan hubungan kekeluargaan yang baru antara yang diangkat dengan yang mengangkat
2. Pengangkatan anak sederhana, yaitu pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan dengan keluarga asli.
3. Pengangkatan anak secara langsung, yaitu pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
4. Pengangkatan anak oleh seorang wanita atau laki-laki, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah.
5. Pengangkatan anak anumerta, merupakan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri yang hidup terlama, setelah meninggalnya suami atau istri yang lain, dengan syarat apabila ternyata pada waktunya mengambil alih pengangkatan anak masih dalam ikatan perkawinan, akan tetapi kematian menghalangi pengangkatan anaknya.²⁸

Pengangkatan anak atau adopsi dapat di bagi menjadi 2 pengertian yaitu:

1. Pengangkatan anak dalam arti luas yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang di angkat dengan orang tua angkat akan timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua sebagai orang tua sendiri.

²⁸Dewi Sartika, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya* (Semarang, 2002), h. 45-46

2. Pengangkatan anak dalam arti terbatas yaitu pengangkatan anak orang lain kedalam keluarga sendiri dan hubungan dengan anak yang di angkat dengan orang tua angkat hanya sebatas pada hubungan sosial saja.²⁹

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2) Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri.

B. Pengertian Orang Tua Angkat

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan pengertian orang tua, yaitu ayah dan/atau ibu kandung, dan ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sebagai orang tua bukan hanya orang tua yang melahirkan, tetapi bisa orang tua tiri, ataupun orang tua angkat. Sehingga anak yang pada awalnya tidak memiliki orang tua kandung, memungkinkan untuk memiliki orang tua lainnya.

Peraturan Menteri Sosial No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat (4) menjelaskan pengertian calon orang tua angkat, yaitu orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua

²⁹R. Soebekti, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika,1993), h. 176

angkat. Sedangkan, Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, menjelaskan bahwa orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan calon orang tua angkat yang dimaksud dalam *Domestic Adoption* adalah pasangan suami isteri warga negara Indonesia, dan janda dengan status kewarganegaraan Indonesia (Pasal 18 Permensos 101 Tahun 2009). Sedangkan calon orang tua angkat yang dimaksud dalam *Intercountry Adoption* adalah warga negara asing dengan warga negara asing, warga negara Indonesia yang salah satu pasangannya warga negara asing, serta warga negara Indonesia yang mengangkat calon anak dari warga negara asing (BAB VI dan BAB VII Permensos 101 Tahun 2009).

Sebelumnya dalam hal perkawinan campuran, Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 disebutkan bahwa seorang wanita selama dalam perkawinan turut kewarganegaraan suaminya. Dan diperjelas dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, yang menjelaskan bahwa pada dasarnya yang menentukan kesatuan kewarganegaraan itu adalah suami. Meskipun pada dasarnya kewarganegaraan suami menentukan, undang-undang ini memberi kesempatan juga kepada warga negara laki-laki untuk melepaskan kewarganegaraannya.³⁰

C. Tujuan dan Motif Pengangkatan Anak

Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung, serta untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak terjadi perceraian. Dalam perkembangan zaman dan masyarakat,

³⁰C.S.T Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 115

tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan³¹.

Hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi:

“Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

Didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan:

“Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Muderis Zaini dalam bukunya *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* menyebutkan beberapa motif pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia yang telah diringkas sebagai berikut.³²

- a. Karena tidak mempunyai anak.
- b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anak.
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
- d. Karena hanya mempunyai seorang anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
- f. Untuk menambah tenaga dalam keluarga.
- g. Karena unsur kepercayaan.
- h. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang

³¹ Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2005), h. 30.

³² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Bina Akasara, 2002), h.15.

tidak mempunyai anak kandung.

- i. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
- j. Karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus.
- k. Adanya hubungan keluarga dan tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga untuk dijadikan anak angkat.
- l. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
- m. Karena anak terdahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk di adopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Dalam kehidupan bermasyarakat pengangkatan anak akan lebih menjamin kesejahteraan hidup bersama, seperti dengan membantu mengurangi anak-anak terlantar, membantu usaha badan-badan panti asuhan dan mengurangi jumlah gelandangan. Perbuatan pengangkatan anak ini banyak dilakukan oleh keluarga Indonesia, terutama keluarga yang belum mempunyai anak atau memang tidak dapat menurunkan keturunan sendiri.

D. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

1. Syarat calon anak angkat

Pasal 12 PP Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan:

- a) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan.
 - 3) Berada dalam asuhan.
 - 4) Memerlukan perlindungan khusus.

b) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) Anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama.
- 2) Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang ada
- 3) Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan c, menjelaskan:

Huruf b: yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c: yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

2. Syarat calon orang tua angkat.

Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007, menentukan:

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima

puluh lima) tahun.

- c. Beragama sama dengan agam calon anak angkat.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum, karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

Peraturan Menteri Sosial (Pasal 28) Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, menentukan:

- a. Calon orang tua angkat dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- b. Jarak waktu pengangkatan anak yang ke dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
- c. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.

E. Jenis Pengangkatan Anak

Di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa Pengangkatan anak terdiri atas:

- 1. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia;
 - a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan; Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih

melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengangkatan anak ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui pengasuhan anak. Hal ini dilakukan melalui penetapan pengadilan

2. Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing

Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing adalah pengangkatan anak yang bersifat *ultimum remidium*, yang artinya pengangkatan anak ini adalah sebagai upaya terakhir. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing adalah pengangkatan anak yang harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Pengangkatan anak yang dimaksud diatas meliputi pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, dan pengangkatan anak warga negara asing di Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pengangkatan anak ini dilakukan melalui putusan pengadilan (Pasal 11, PP No. 54 Tahun 2007). Apabila putusan tidak melalui pengadilan, maka pengangkatan anak dapat dibatalkan.

Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing harus dilaksanakan di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, yaitu Pengangkatan anak warga negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh warga negara asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan.

3. Pengangkatan Anak Secara Umum

Pengangkatan anak dalam praktek dapat terjadi antar warga negara Indonesia, artinya baik anak angkat maupun orang tua angkatnya adalah warga negara Indonesia (WNI). Atau antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia, misalnya anak warga negara Indonesia sedangkan orang tua angkatnya warga negara asing, atau sebaliknya anak warga negara asing sedangkan orang tua angkatnya warga negara Indonesia.

Antara orang tua angkat dengan anak angkatnya minimal harus terdapat selisih umur 25 tahun dan maksimal 45 tahun untuk itu setiap orang dewasa yang ingin mengangkat anak. Apabila calon orang tua dalam perkawinan, maka usia perkawinan orang tua angkat minimal telah berlangsung selama 5 (lima) tahun, sehingga ada selisih antara usia perkawinan calon orang tua angkat dengan usia calon anak angkat minimal 5 (lima) tahun.³³

4. Pengangkatan Anak Secara Adat Kebiasaan

Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri semikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu menimbulkan suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandung sendiri. Perbuatan mengangkat anak demikian ini adalah merupakan gejala yang umum dengan negara Indonesia.³⁴ Pengangkatan anak dilakukan dengan cara penyerahan anak oleh orang tuanya kepada yang mengangkat, tanpa disaksikan oleh orang-orang yang khusus dipanggil untuk keperluan itu, tanpa upacara, tanpa surat. Pendek

³³ Darmawan Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2003). h. 97

³⁴ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995). h. 117

kata, tanpa bentuk apapun, tetapi pengangkatan anak itu akan segera diketahui oleh para tetangga.³⁵

Dalam beberapa kelompok masyarakat, pengangkatan anak berdasarkan hukum adat setempat dikenal dengan cara mekanisme yang berbeda. Hanya saja, secara umum prinsip hukum adat dalam pengangkatan anak adalah: si anak angkat akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan orang tua angkatnya. Pada beberapa suku, anak yang diangkat terputus hubungannya dengan orang tua kandung.³⁶

Pengangkatan anak yang dilakukan biasanya mengambil anak dari yang bukan keluarga, yaitu anak berasal bukan dari keluarga sendiri yang diangkat menjadi anak angkat dan menjadi bagian dari keluarga itu. Biasanya tindakan ini disertai dengan penyerahan barang-barang atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula. Anak yang diangkat juga bisa berasal dari kalangan keluarga, serta berasal dari kalangan keponakan-keponakan.

Mengangkat keponakan menjadi anak sesungguhnya lebih sering terjadi, banyak alasan-alasan yang menjadi pendorong melakukan pengangkatan anak dari kalangan keponakan, diantaranya:³⁷

1. Tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut, merupakan jalan untuk mendapat keturunan.
2. Belum dikarunia anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.

³⁵ R. Supomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat* (Bandung :Sumur Bandung, 1980), h.21.

³⁶ Muhammad Yasin. "Adopsi Menurut Hukum Adat" dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6157/adopsi-menurut-hukum-adat> (09 July 2016)

³⁷ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1995). h. 119

3. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.

Di daerah-daerah yang mengikuti garis keturunan dari pihak laki-laki (kebapakan) seperti di Tapanuli, Lampung, Bali, dimana pengangkatan anak hanya dilakukan terhadap anak laki-laki saja, dengan tujuan adalah untuk meneruskan garis keturunan dari pihak bapak. Berbeda dengan daerah yang mengikuti garis keturunan dari pihak ibu (keibuan) terutama Minangkabau. Daerah Minangkabau pihak perempuan tidak mendesak untuk melakukan pengangkatan anak karena yang mewarisi adalah anak-anak dari saudaranya yang perempuan.

Motivasi pengangkatan anak secara adat juga lebih didasari pada kekhawatiran atas kepunahan generasi. Berbeda dari esensi pengangkatan anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang lebih menekankan motivasi demi kepentingan terbaik si anak. Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak merumuskan secara jelas:

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁸

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan juga diuraikan dalam Permensos RI No. 110 Tahun 2009 Pasal 17 yang menyatakan bahwa:

“Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Serta dalam ayat (2) disebutkan bahwa kepala instansi sosial propinsi dan kabupaten/kota berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap pengangkatan anak”.

³⁸Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Predana Group, 2008), h. 16.

5. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fiqh, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam³⁹. Hukum islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah swt.⁴⁰

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁴¹

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan

³⁹Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Predana Group, 2008), h. 21.

⁴⁰ Anonim, <http://www.scribd.com/KedudukanSaudara-Kandung-Dalam\hukumislam>, (03 Juli 2014).

⁴¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum* (Jakarta : Bina Akasara, 2002), h. 54.

terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.⁴² Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pengertian Anak Angkat sebagai:

“Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Perkawinan Nabi Muhammad saw., dengan bekas istri anak angkatnya ini menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak serta merta menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung, karena menikahi bekas istri anak angkat itu dibolehkan, sedangkan menikahi bekas istri anak kandung diharamkan untuk selama-lamanya.⁴³

Pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam Surat Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya’ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh Ketua Umum K.H. M. Syukeri Ghazali, sebagai berikut:

- 1) Adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam.
- 2) Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, agar ke Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara.

⁴²Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum* (Jakarta : Bina Akasara, 2002), h. 55.

⁴³ Quraish Sihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan, Keserasian Al-Qu’ran. Volume XIV* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 20

3) Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hal waris/wali mewalii, dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memerikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.

4) Adapun adopsi yang dilarang, adalah:

- a. Adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, misalnya Nasrani dengan maksud anak angkatnya dijadikan pemeluk agama Nasrani, bahkan sedapat-dapatnya dijadikan pemimpin agama itu,
- b. Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya, biasanya berlatar belakang seperti tersebut diatas. Oleh karena itu hal ini ada usaha untuk menutup adopsi.

6. Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pengangkatan anak berdasarkan undang-undang adalah pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan proses hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan tertentu.

Dalam Permensos No. 110 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengangkatan anak berdasarkan undang-undang dalam dilakukan secara langsung dan melalui lembaga pengasuhan anak. Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa:

“Pengangkatan Anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung”.

Sedangkan pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) yaitu:

“Pengangkatan Anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak adalah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk oleh Menteri”.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi:

“Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

Sedangkan didalam ayat (3) menyebutkan:

“Pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Di dalam hukum tertulis tidak terdapat aturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Namun bagi golongan Tionghoa yang tunduk pada B.W ada pengaturannya secara tertulis dalam Stb. 1917 No. 129. *Staatblaad* ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh mereka yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (janda).

Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.⁴⁴ Menurut peraturan adopsi *Staatblad* 1917 No. 129 hanya anak laki-laki yang dapat diangkat sebagai anak. Namun kemudian berdasarkan bahwa sekarang anak perempuan sudah dapat diadopsi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pengangkatan anak semata-mata hanyalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi kesejahteraan anak saja. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang

⁴⁴ Muhammad Syafii Antonio, *The Super Leader Super Manager* (Jakarta: Tazkia Multimedia & pro Lm Centre, 2007). h. 52

menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.⁴⁵

Ada beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
6. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak diatas menyatakan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dilakukan

⁴⁵ YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002). h. 123

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga diatur, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, sedangkan dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Oleh karena itu perlu pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia.

F. Persyaratan Calon Anak Angkat (CAA) dan Calon Orang Tua Angkat (COTA)

Proses pengangkatan anak memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat pengangkatan anak yang dimaksud meliputi syarat terhadap calon anak dan syarat calon orang tua angkat. Persyarat yang dimaksud dikemukakan dalam Bab III Pasal 12 s/d Pasal 18, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Syarat terhadap calon anak angkat dijelaskan dalam Pasal 12, yaitu:

- 1) Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun, anak yang dimaksud mempunyai 3 (tiga) kategori yaitu:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, menjadi prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, misalnya anak korban bencana, anak pengungsian, dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Anak memerlukan perlindungan khusus

adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

- 2) Anak merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;⁴⁶
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;⁴⁷
- 4) Memerlukan perlindungan khusus.⁴⁸

Bagi calon orang tua angkat yang akan melakukan pengangkatan anak juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

⁴⁶Anak Terlantar atau diterlantarkan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya. (UU Perlindungan Anak; Pasal 1 butir 6; Permen Sosial Pengangkatan Anak; Pasal 1 butir 13);

⁴⁷ Lembaga Pengasuh Anak adalah lembaga atau organisasi social atau yayasan yang bebadan hokum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak (PP Pengangkatan Anak; Pasal 1 butir 5). Sampai akhir tahun 2010 tidak kurang dari 6 (enam) Lembaga Pengasuhan Anak yang telah diberi izin oleh Menteri Sosial untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.

⁴⁸ Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang diesplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban dari pnyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat., dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. (Permen Sosial Pengangkatan anak: Pasal 1 butir 14);

- 1) Sehat jasmani dan rohani.
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- 9) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 10) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial.
- 11) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan
- 12) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Persyaratan calon orang tua angkat sebagaimana yang disebutkan di atas, perlu diperhatikan bahwa calon orang tua angkat dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak paling singkat 2 (dua) tahun.⁴⁹ Dimana jarak waktu pengangkatan anak yang kedua dapat dikecualikan bagi anak penyandang

⁴⁹Dessy Balaati, *Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia*, LexPrivatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, h. 138

cacat. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat. Pernyataan ini dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu harus adanya izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia, harus memperoleh izin tertulis dari Menteri, serta harus melalui lembaga pengasuhan anak. Persyarat diatas dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

G. Lembaga Pengangkatan Anak

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintahan No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung. ”Sedangkan yang dimaksud dengan pengangkatan anak melalui lembaga pengangkatan anak” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Organisasi atau Lembaga sosial yang mendapat izin Menteri Sosial untuk melaksanakan proses pengangkatan anak:

- a. Propinsi DKI Jakarta terdiri dari: 1) Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, jalan Barito II/55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan

Keputusan Menteri Sosial RI No.23/HUK/KM/V/1982, dan 2) Yayasan Tiara Putra Jakarta, Jalan Margaguna No. 1 Cilandak Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No.21/HUK/IV/1984.

- b. Propinsi Jawa Barat, yaitu: Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda, Jalan Imam Bonjol No. 14 Bandung, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 18/HUK/KM/IV/1983.
- c. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Yayasan Sayap Ibu cabang Yogyakarta, Jalan Pringwulung Condong Catur, Depok, Sleman Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No.37/HUK/SK/V/1982.
- d. Propinsi Jawa Tengah, yaitu Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi, Jalan Kolonel Sutarto 150 Surakarta, Solo, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No.42/HUK/SK/V/1982.
- e. Propinsi Jawa Timur, yaitu Yayasan Balai Keselamatan Matahari Terbit, Surabaya, Jalan Kombes Duriat 10-12 Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No.62/HUK/KM/VII/1982.
- f. Propinsi Kalimantan Barat, yaitu Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak, Jalan Jenderal Ahmad Yani 5, Pontianak, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No.27/HUK/1990.
- g. Propinsi Riau, yaitu Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda cabang Batam, Jalan Marta Dinata Batam, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No.70/HUK/1996.

Ketujuh organisasi tersebut di atas yang diakui oleh Pemerintah sebagai organisasi sosial yang dapat melaksanakan pengangkatan anak apabila ada organisasi sosial lainnya dari ketujuh organisasi dimaksud, maka pengangkatan

anak tersebut dapat dibatalkan melalui permohonan Departemen Sosial ke Pengadilan Negeri.

H. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak PUSAT (Tim PIPA PUSAT)

Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disebut Tim PIPA adalah suatu wadah pertemuan koordinasi lintas secara komprehensif dan terpadu guna memberikan pertimbangan izin pengangkatan anak (Pasal 1 Permensos No.37/HUK/2010 tentang Tim Perimbangan Peizinan Pengangkatan Anak Pusat). Tim PIPA ada 2 (dua) yaitu Tim Perimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat yang selanjutnya disebut Tim PIPA Pusat, dan Tim Perimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah yang selanjutnya disebut Tim PIPA Daerah. Tim PIPA Pusat adalah Tim yang memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam memberikan izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing atau pengangkatan anak yang salah satu calon orang tua angkat warga negara asing atau pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Sedangkan, Tim PIPA Daerah adalah Tim yang memberikan pertimbangan kepada gubernur, kepada instansi sosial dalam memberikan izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara warga negara Indonesia. Perjelasan diatas terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial No.37/HUK/2010 Tentang Tim Pertimbangan Peizinan Pengangkatan Anak Pusat.

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi Tim PIPA

Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Tim PIPA dijelaskan dalam BAB II Pasal 2 sampai Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial No. 37/HUK/2010 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat. Tim PIPA Pusat

berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Menteri, dan Tim PIPA Daerah berkedudukan di ibukota provinsi dan bertanggung jawab kepada gubernur c.q. kepala instansi social.

Tim PIPA Pusat mempunyai tugas membantu Menteri memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal atau pengangkatan anak yang salah satu calon orang tua angkat warga negara asing. Tugas Tim PIPA daerah hampir sama dengan tugas Tim PIPA Pusat, yaitu membantu gubernur c.q. kepala instansi sosial memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Indonesia atau pemberian rekomendasi untuk pengangkatan anak yang salah satu calon orang tua angkat warga negara asing.

Tim PIPA dalam melaksanakan tugasnya juga memiliki fungsi yang juga harus diselenggarakan, yaitu:

- 1) Mengadakan penelitian dan penelaahan serta memberikan pertimbangan atas permohonan izin pengangkatan anak;
- 2) Memberikan saran sesuai dengan ketentuan, tugas pokok dan fungsi tiap- tiap anggota berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan;
- 3) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas untuk Tim PIPA Pusat kepada Menteri dan untuk Tim PIPA Daerah kepada gubernur c.q. kepala instansi;
- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan pengangkatan anak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Keanggotaan Tim PIPA

Keanggotaan Tim PIPA diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Pusat, BAB III Pasal 6 sampai Pasal 10. Tim PIPA terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua Tim PIPA Pusat dijabat oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial; dan Sekretaris Tim PIPA Pusat oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak Kementerian Sosial. Keanggotaan Tim PIPA terdiri atas unsur Instansi/Lembaga yang terkait yaitu:

- a) Kementerian Sosial.
- b) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- c) Kementerian Luar Negeri
- d) Kementerian Hukum dan HAM.
- e) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- f) Kementerian Kesehatan.
- g) Markas Besar Polri.
- h) Kementerian Dalam Negeri.
- i) Kementerian Agama.
- j) Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- k) Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan
- l) Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.

Anggota Tim PIPA Pusat melaksanakan tugas dan peran sebagai anggota Tim PIPA sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Tugas anggota-anggota Tim PIPA akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Kementerian Sosial

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengangkatan anak;
- 2) Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA;
- 3) Menelaah permohonan ijin pengangkatan anak oleh COTA;
- 4) Memeriksa hasil kunjungan rumah pertama (home visit I) keluarga COTA;
- 5) Meneliti keabsahan Surat Keputusan Ijin Asuhan yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II yang menangani bidang pengangkatan anak;
- 6) Memeriksa hasil kunjungan rumah kedua (home visit II) keluarga COTA setelah 6 (enam) bulan dalam asuhan keluarga COTA;
- 7) Menyelenggarakan sidang Tim PIPA; dan
- 8) Meneruskan rekomendasi hasil sidang Tim PIPA kepada Menteri.

b. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Tugasnya adalah meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA sesuai dengan lingkup tugasnya, antara lain: meneliti dan memeriksa surat pernyataan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak.

c. Kementerian Hukum dan HAM

- 1) Meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA, antara lain Paspor suami isteri, ijin tinggal suami dan atau isteri pemegang

KITAS/KITAP, dan dokumen status kewarganegaraan;

- 2) Merekomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Imigrasi, agar anak yang sedang dalam proses pengangkatan anak tidak diterbitkan paspornya;
- 3) Meneliti legalitas tandatangan pejabat pemerintah dan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, terhadap dokumen yang akan dipergunakan di negara lain; dan pejabat Kementerian Luar Negeri terhadap dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia.

d. Kementerian Luar Negeri

- 1) Meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA, antara lain:
 - Surat pernyataan kesamaan status dan hak anak angkat dengan anak kandung;
 - Surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang diketahui oleh perwakilan asing asal COTA;
 - Copy akta kelahiran suami dan isteri yang disahkan oleh Notaris dan Perwakilan RI Indonesia di negara COTA berasal;
 - Paspor dan keterangan ijin tinggal suami dan isteri;
 - Surat keterangan penghasilan suami dan isteri yang disahkan oleh perwakilan RI di negara COTA berasal;
 - Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga isteri yang disahkan oleh Notaris dan perwakilan RI di negara COTA berasal;
 - Surat kelayakan untuk mengangkat anak dari perwakilan asing asal COTA dan instansi yang berwenang dari negara yang bersangkutan; dan
 - Surat pernyataan akan menghubungi perwakilan RI dimana COTA tinggal.

- 2) Melegalisasi pengesahan tanda tangan pejabat Kementerian Hukum dan HAM;
 - 3) Melegalisasi pengesahan dokumen yang berasal dari luar negeri oleh KBRI dan KJRI untuk kemudian dibawa ke Indonesia;
 - 4) Dokumen disahkan oleh Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri;
 - 5) Merekomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk melakukan koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk kunjungan rumah kepada keluarga COTA di negara asal COTA yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan RI di luar negeri.
- e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
- Tugasnya adalah meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f. Kementerian Kesehatan
- Tugasnya meneliti dan memeriksa keabsahan surat keterangan kesehatan COTA, yaitu lampiran yang berupa hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan kebidanan dan kandungan; dan pemeriksaan kesehatan jiwa.
- g. Markas Besar Polri
- Tugasnya meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA yang berkaitan dengan persyaratan administrasi penerbitan Surat Keterangan

Catatan Kepolisian (SKCK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Kementerian Dalam Negeri

Tugasnya meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA sesuai dengan tugas dengan perannya, yang meliputi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing pemegang KITAS, Akta Pencatatan Sipil, dan Surat Keterangan kependudukan lainnya.

i. Kementerian Agama

Tugasnya meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, meliputi Surat Nikah atau Akta Nikah, Surat Keterangan mengenai hibah harta untuk anak serta tidak akan menikahi anak angkat perempuan; dan kesamaan agama COTA dan CAA.

j. Komisi Nasional Perlindungan Anak

Tugasnya meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan-persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi:

- 1) Memeriksa kepatuhan pemohon dalam memenuhi setiap persyaratan materil dan formil COTA dan CAA;
- 2) Memeriksa keabsahan dan isi surat pernyataan kesediaan anak untuk diangkat oleh COTA;
- 3) Memeriksa keabsahan dan isi surat pernyataan COTA untuk mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak; dan

- 4) Memeriksa surat putusan pengadilan dan atau instansi terkait mengenai status anak.

k. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia

Tugasnya meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi:

- 1) Menelaah kelengkapan, ketepatan, dan konsistensi informasi pada laporan sosial yang dibuat pekerja sosial;
- 2) Memastikan bahwa informasi yang telah ditelaah tersebut menunjukkan kelayakan COTA untuk mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak;
- 3) Memantau dan memastikan bahwa rekomendasi dari laporan sosial dari pekerja sosial dapat terpenuhi.

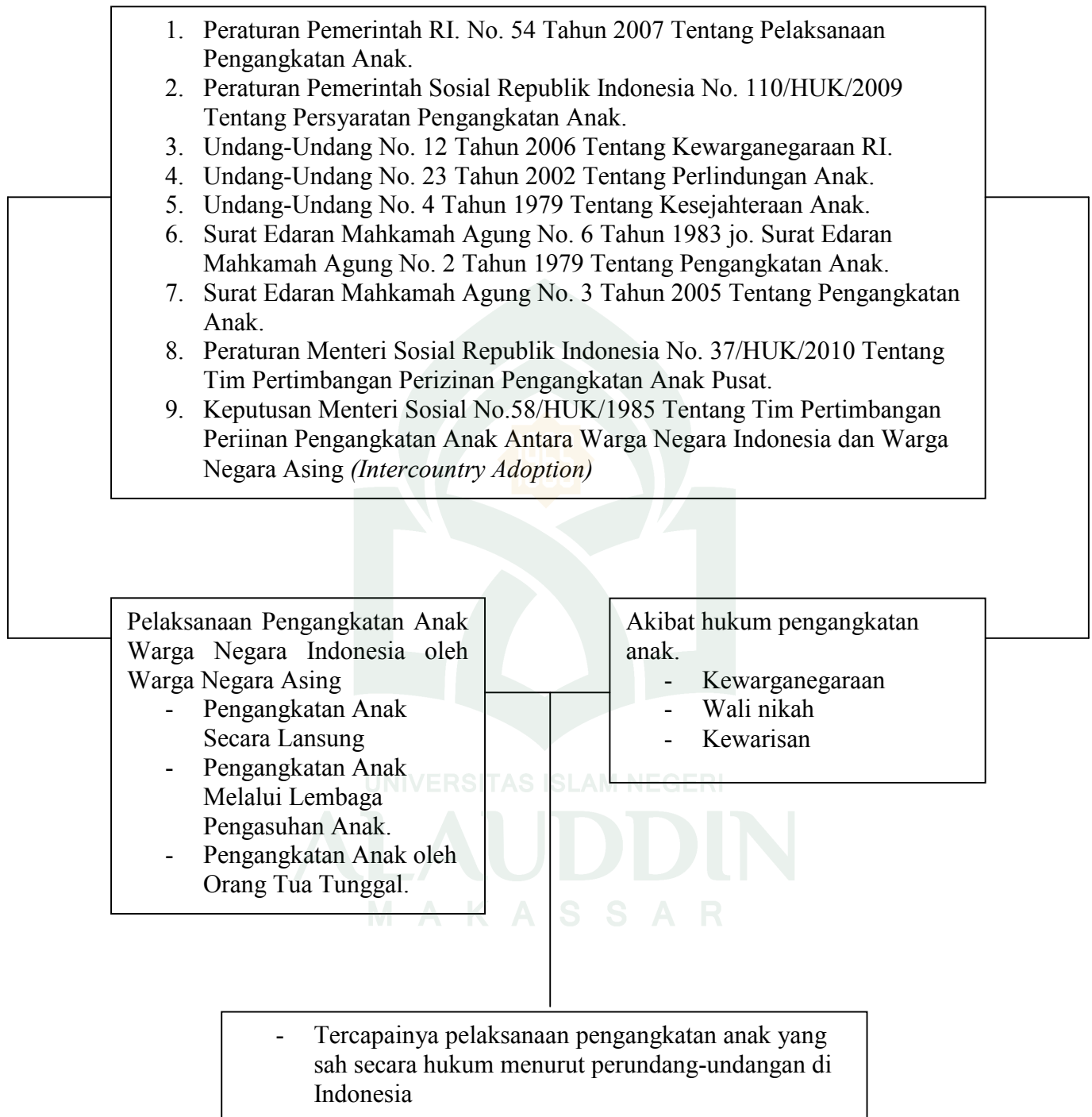
Penelitian dan pengkajian terhadap kelengkapan persyaratan pengangkatan anak akan disampaikan oleh Tim PIPA Pusat berupa bentuk laporan kepada Menteri Sosial. Menteri Sosial dapat memberikan atau menolak izin permohonan pengangkatan anak berdasarkan laporan dan pertimbangan dari Tim PIPA Pusat. Sehingga, Tim PIPA Pusat adalah Tim yang sangat penting dalam pemberian izin pengangkatan anak warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

1. Mekanisme Kerja Tim PIPA

Mekanisme kerja Tim PIPA Pusat diatur dalam Pasal 13 sampai Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial No. 37/HUK/2010, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tim PIPA Pusat mengadakan rapat koordinasi untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kelengkapan persyaratan pengangkatan anak, diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Penelitian dan pengkajian oleh Tim PIPA Pusat ini dilakukan oleh anggota Tim dimaksud sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Setelah melakukan rapat koordinasi, Tim PIPA Pusat menyampaikan laporan dan pertimbangan izin pengangkatan anak kepada Menteri Sosial. Menteri Sosial dapat memberikan atau menolak izin permohonan pengangkatan anak berdasarkan laporan dan pertimbangan dari Tim PIPA Pusat.
3. Tim PIPA Pusat dapat melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah melalui tim koordinasi Program Kesejahteraan Sosial Anak pusat dan daerah, organisasi masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu. Tim PIPA dalam melaksanakan tugasnya harus mempertimbangkan pendapat dari Lembaga Pengasuhan Anak yang memfasilitasi dan/atau membantu Calon Orang Tua Angkat dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak.

Kerangka Konseptual



Peraturan hukum yang dibahas dalam penelitian skripsi ini diantaranya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 Tentang

Persyaratan Pengangkatan Anak.Serta Keputusan Menteri Sosial No. 58/HUK/1985 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dan warga negara asing (Intercountry Adoption). Ketiga peraturan ini menjadi dasar pengangkatan anak di Indonesia.

Proses Pengangkatan Anak



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai Proses Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Makassar Tentang Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. Dalam memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung dan telaah pustaka serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar yang difokuskan di Pengadilan Negeri Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁵⁰ Dalam rangka pendekatan pada objek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka spesialis pada penelitian ini adalah.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim yang mengatur

⁵⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rieneka Cipta, 2002), h.32.

terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan Normatif adalah pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵¹

2. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian menuju pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).⁵²

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pejabat yang berkompeten, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada releansinya dengan materi yang dibahas. Data sekunder terdiri dari

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h.93.

⁵² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982), h.10.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan.⁵³

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- 3) Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.
- 8) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.37/HUK/2010 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku, artikel ilmiah, dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

⁵³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 392.

1. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penyusun teliti.
2. Wawancara,⁵⁴ yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Dalam hal ini, dilakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini.
3. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.⁵⁵ Metode observasi ini, digunakan untuk mengumpulkan data tentang Keputusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana di artikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah :

- a) *Editing* data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

⁵⁴ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Cet.V, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2004), h.58.

⁵⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), h. 100

- b) *Koding* data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara member kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan Keputusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah wawancara, dokumen, dan observasi. Instrument penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yang akan memberi gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan dicari pemecahannya dan ditarik kesimpulan, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum di dalam kenyataannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Makassar merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut:

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Pengadilan Negeri Makassar selain memiliki tugas pokok yang telah disebutkan di atas, juga memiliki visi dan misi.

Visi Pengadilan Negeri Makassar adalah mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan bagi masyarakat.

4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparat.

B. Proses Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing di Indonesia

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Baso Rasyid, SH,MH., dalam wawancara dijelaskan bahwa: “proses pengangkatan anak di muka persidangan itu secara umum sama, hanya saja dalam pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing pemeriksaan dokumen-dokumennya adalah hal yang terpenting”.⁵⁶

Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan dengan suatu pengesahan di pengadilan tempat domisili anak. Beliau menjelaskan bahwa permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan negeri atau permohonan tertulis. Permohonan dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya atau juga didampingi atau dibantu seseorang. Dalam hal didampingi ini, pemohon harus tetap hadir di pemeriksaan persidangan. Begitu juga kalau pemohon memakai seorang kuasa, ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang pengadilan negeri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam permohonan dalam pengangkatan anak warga negara asing, permohonan harus dilakukan tertulis, karena sebelum mengajukan ke pengadilan negeri banyak persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain:

⁵⁶ Baso Rasyid, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 23 Agustus 2016.

- a) Permohonan yang sudah ditandatangani oleh pemohon harus diberi materai secukupnya.
- b) Permohonan yang masuk akan diproses, dan dilakukan penunjukan hakim lalu menentukan hari sidang, yang kemudian diberitahukan kepada pemohon.

Pemohonan yang diberikan kepada pengadilan negeri akan diproses di muka persidangan sama dengan proses persidangan perdata pada umumnya, sidang pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing juga diproses persidangannya yang sama. Akan tetapi pemeriksaan dokumen, dan saksi-saksi yang lebih banyak. Apabila dokumen-dokumen sudah diperiksa dan sama dengan aslinya, serta saksi-saksi tidak ada yang menyampaikan keberatan di muka persidangan, maka bisa langsung diputuskan oleh hakim dan membuktikan bahwa pengangkatan anak telah sah dilakukan.

Putusan Pengadilan adalah syarat utama bagi permohonan *intercountry adoption*. Di samping itu sering dilupakan bahwa dalam hal pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, kepentingan negara dan bangsa ikut menentukan aspek-aspek keamanan politik dan budaya, sehingga pengangkatan anak semacam ini seharusnya merupakan *Utimum Remidium*.

Intercountry Adoption dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati dalam menerima kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengangkatan anak:

- a) Pengadilan Negeri harus mendengar langsung penjelasan dari.
 - 1) Calon orang tua angkat warga negara asing (baik suami maupun istri), dan orang tua kandung (jika ada).

- 2) Badan/Yayasan Sosial yang mendapat ijin dari Kementerian Sosial atau Menteri Sosial dalam hal pengangkatan anak.
 - 3) Seorang pejabat instansi Sosial yang akan menjelaskan tentang kehidupan sosial calon anak angkat.
 - 4) Calon anak angkat warga negara Indonesia, kalau bisa diajak bicara.
 - 5) Pejabat imigrasi, untuk menjelaskan tentang status imigratur dari calon orang tua angkat warga negara asing.
 - 6) Pihak kepolisian setempat.
- b) Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang menjadi bahan permohonan atau pertimbangan putusan, diantaranya:
- 1) Surat-surat resmi tentang kelahiran anak angkat warga negara Indonesia, seperti akta lahir, dan akta-akta lain yang diperlukan.
 - 2) Surat-surat keterangan, laporan sosial, pertanyaan-pertanyaan, yang sudah ada sebelum permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri.
 - 3) Surat keterangan dari kepolisian tentang calon orang tua angkat warga negara asing tersebut telah berada dan bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan calon anak angkat warga negara Indonesia tersebut.
 - 4) Surat-surat resmi tentang pribadi calon orang tua angkat warga negara asing, surat yang dimaksud meliputi:
 - 1) Surat nikah calon orang tua angkat.
 - 2) Surat lahir calon orang tua angkat.
 - 3) Surat keterangan kesehatan.
 - 4) Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan calon orang tua angkat (suami-istri).

- 5) Persetujuan atau izin untuk mengangkat anak Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal orang tua angkat.
- 6) Surat keterangan atas dasar penelitian *Social Worker* dari Instansi/Lembaga Sosial yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat warga negara asing.
- 7) Surat pernyataan calon orang tua angkat warga negara asing bahwa mereka tetap berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri/Perwakilan RI setempat walaupun anak tersebut telah memperoleh kewarganegaraan orang tua angkat warga negara asing-nya.

Dalam hal pemeriksaan barang bukti ini, surat-surat resmi tentang pribadi orang tua angkat warga negara asing harus telah didaftarkan dan dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan Republik Indonesian tempat negara asal calon orang tua angkat warga negara asing tersebut.

Syarat-syarat yang diperlukan bagi calon orang tua angkat untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak, sama hal yang dengan proses permohonan mendapat izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial atau dari Lembaga Pengangkatan Anak, syarat-syaratnya yaitu:

- a) Syarat bagi calon orang tua angkat warga negara asing (pemohon)
 - 1) Harus disertai keterangan domisil dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
 - 2) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk, bahwa calon orang tua angkat warga negara asing memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang warga Indonesia.
 - 3) Sehat jasmani dan rohani

- 4) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
 - 6) Tidak merupakan pasangan sejenis.
 - 7) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
 - 8) Pengangkatan anak harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak yang memiliki izin dalam kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak langsung dilakukan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat (*private adoption*) tidak diperbolehkan.
 - 9) Pengangkatan anak oleh warga negara asing yang tidak terikat perkawinan yang sah atau belum menikah (*single parent adoption*), tidak diperbolehkan
 - 10) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- b) Syarat bagi calon anak angkat
- 1) Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, yakni:
 - a. Anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama.
 - b. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak, yang dimaksud sepanjang ada alasan mendesak yaitu anak korban bencana alam, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.
 - c. Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus,

- 2) Disertai penjelasan tertulis Menteri Sosial bahwa calon anak angkat warga negara Indonesia tersebut diizinkan untuk diangkat oleh calon orang tua angkat warga negara asing yang bersangkutan.
- 3) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan.
- 4) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak naungan kementerian sosial.
- 5) Memerlukan perlindungan khusus yakni anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, dan perdagangan anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

*Intercountry Adoption*⁵⁷. Pengangkatan anak sudah dilakukan sejak dulu tetapi cara dan prosesnya berbeda-beda. Sama halnya dengan pengangkatan anak di berbagai negara, selalu ada perbedaan dan variasi. Dari tahun ke tahun masalah pengangkatan anak selalu berkembang dan mengalami perubahan, sebagaimana diketahui bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak sudah ada sejak zaman sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* Tahun 1917 No.129.

Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam

⁵⁷ *Intercountry Adoption* adalah pengangkatan anak yang calon orang tua angkat yang keduanya adalah warga negara asing, salah satu calon orang tua angkat adalah warga negara asing (pasangan campur/*mixed couple*), dan calon orang tua angkat warga negara Indonesia yang mengangkatan anak warga negara asing.

lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.⁵⁸ Pengangkatan anak dalam Islam dijelaskan pada QS al-Ahzab/33:4.

مَّا جَعَلَ اللَّهُ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْمٍ قَدِّعَ عِلَّ أَزْوَاجِكُمُ الْأُفْطُ هِرُونَ
 أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ هَدِي السَّبِيلَ ٤

Terjemahnya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).⁵⁹

Pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal hukum Barat/hukum sekular yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap angka angkat.

Setelah zaman kemerdekaan yaitu pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, terdapat peraturan tentang pengangkatan anak yaitu dalam Pasal 2. Setelah keluarnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan, Pada tahun 1978 dikeluarkanlah Surat Edaran Direktur Kehakiman Nomor JHA 1/1/2

⁵⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 12

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 334.

tanggal 24 Februari 1978, Surat Edaran tersebut mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing.

Peraturan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing tahun ke tahun diperbaharui, peraturan terbaru tentang pengangkatan anak dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Selain peraturan-peraturan tersebut ada juga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung yang dikeluarkan untuk mengatur pengangkatan anak, yaitu SEMA No.2 Tahun 1979 yang disempurnakan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak Lalu Keluarnya SEMA No.3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak yang lebih menekankan bahwa agama anak angkat harus sama dengan agama calon orang tua angkatnya. Peraturan-peraturan pengangkatan anak tersebut tidak terlepas dari upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Khusus pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing bukan hanya berpengaruh pada anak angkat saja tetapi juga terhadap kewarganegaraanya, sehingga penulis mengaju pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diketahui bahwa pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing merupakan upaya terakhir (*ultimatum remidium*) dan calon anak angkat haru berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.

Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing harus dilakukan melalui lembaga Pengasuhan Anak, dijelaskan dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009, Calon Anak Angkat (CAA) pada pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang warga negara asing harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak. *Intercountry Adoption* melalui Lembaga Pengasuhan Anak juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No, 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 14 disebutkan:

“Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing harus memenuhi syarat melalui lembaga pengasuhan anak. Berdasarkan peraturan tersebut jelas bahwa pengangkatan anak yang tidak melalui lembaga pengasuhan anak tidaklah diperbolehkan dalam pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, sehingga pengangkatan anak secara langsung antara orang tua kandung warga negara Indonesia dengan calon orang tua angkat warga negara asing yang disebut dengan *private adoption* tidak diperbolehkan”.

Mendapat putusan *intercountry adoption* bukan proses yang muda dan cepat. Banyak persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat warga negara asing. Proses pengangkatan anak antara warga negara Indonesia oleh warga negara asing akan dijelaskan berdasarkan tahapan-tahapan, yaitu:

a. Konsultasi Kementerian Sosial

Calon Orang Tua Angkat (COTA) warga negara asing melakukan konsultasi di Kementerian Sosial. Pihak Kementerian Sosial harus mengetahui motivasi secara langsung dari COTA warga negara asing mengangkat anak. Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan Konsultasi dilakukan agar calon orang tua angkat mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, dengan maksud memberikan informasi tentang pengangkatan anak dan memberikan motivasi untuk mengangkat anak. Konsultasi oleh pihak Kementerian Sosial tetap memperhatikan

motivasi langsung oleh COTA warga negara asing. Motivasi pengangkatan anak harus memperhatikan prinsi pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip pengangkatan anak tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 110/HUK/2009, yang meliputi:

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- 3) COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Dalam asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut.
- 5) Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Prinsip pengangkatan anak tersebut harus diperhatikan oleh Pihak Kementrian Sosial sebelum memberikan ijin kepada COTA warga negara asing untuk melakukan pengangkatan anak. Prinsip pengangkatan anak ini menjadi penting, karena sering tidak diperhatikan bahwa *intercountry adoption* terdapat aspek-aspek yang berarti bagi kepentingan negara kita sendiri, yaitu kemungkinan berubahnya kewarganegaraan calin anak angkat yang bersangkutan, serta kemungkinan penyelundupan secara sah terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Mengenai Kewarganegaraan, yaitu :

“Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh warga negara Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu”.

Undang-Undang No, 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 5, yaitu:

“Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.

Dalam proses konsultasi ini, pihak pemohon yaitu COTA warga negara asing harus membawa surat permohonan yang berisi motivasi mengangkat anak, Surat Nikah, Surat Akta Kelahiran Suami-Isteri, dan Paspor Suami-Isteri kepada Pihak Kementerian Sosial.

Konsultasi kepada Pihak Kementerian Sosial diharuskan karena pemerintah berhak mengetahui adanya proses pengangkatan anak yang akan dilakukan oleh warga negara asing. Berdasarkan Konsultasi yang bersifat basic tersebut, maka Pihak Kementerian menyarankan COTA warga negara asing untuk berkonsultasi dengan Lembaga Pengasuhan Anak. Hal tersebut dikarenakan bahwa *intercountry adoption* melalui Lembaga Pengasuhan Anak (Pasal 14 PP No. 54 Tahun 2010).

b. Proses di Lembaga Pengasuhan Anak

Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melakukan proses pengangkatan anak sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.65/HUK/2010 Tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan atau salah satu Lembaga Pengasuhan Anak yang resmi melakukan proses *intercountry adoption* di Indonesia. Khusus dalam pelaksanaan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing pengangkatan anak harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dalam Pasal 42 Juga menyebutkan bahwa Calon Anak Angkat (CAA) pada pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang warga negara asing harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak. COTA warga negara asing harus memenuhi persyaratan materil dan persyaratan administratif, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri

Sosial RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, sebagai berikut:

- a) Persyaratan Materil (Pasal 44 Permensos No. 110/HUK/2009):
 - 1) Sehat jasmani dan rohani baik fisik maupun mental mampu mengasuh CAA.
 - 2) Berada dalam rentang umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat COTA mengajukan permohonan pengangkatan anak.
 - 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
 - 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
 - 5) Berstatus nikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun.
 - 6) Tidak merupakan pasangan sejenis.
 - 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
 - 8) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.
 - 9) Memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya.
 - 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak.
 - 11) Membuat pernyataan tertulis akan ada bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - 12) Dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Kementerian Sosial dan ke perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut.
 - 13) COTA bersedia dikunjungi oleh Perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - 14) Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak.
 - 15) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
 - 16) Memperoleh ijin tertulis dari pemerintah negara asal COTA melalui kedutaan atau perwakilan negara COTA.
 - 17) CAA berada di Lembaga Pengasuhan Anak.
 - 18) Telah bertempat tinggal di Indonesia secara resmi selama 2 (dua) tahun.
 - 19) Memperoleh ijin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.
- b) Persyaratan Administratif (Pasal 45 Permensos No.110/HUK/2009)

- 1) Surat keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah.
- 2) Surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jia Pemerintah yang menyatakan COTA tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa.
- 3) Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obsteri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah.
- 4) Akte kelahiran COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut.
- 5) Copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tetap (KITAP), serta surat keterangan tempat tinggal.
- 6) Copy KTP orang tua kandung CAA dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung CAA dan/atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung CAA dan/atau penetapan pengadilan tentang agama CAA.
- 7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) COTA dari Mabes Polri.
- 8) Copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut.
- 9) Copy akte kelahiran anak kandung COTA, apabila COTA telah mempunyai seorang anak.
- 10) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara COTA dan dilihat dan dicatat oleh kedutaan besar negara COTA dan dilihat dan dicatat di Kementerian Luar Negeri dan Departemen Hukum dan HAM.
- 11) Surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial.
- 12) Surat ijin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup.
- 13) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak.
- 14) Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
- 15) Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Kementerian Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut.
- 16) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

- 17) Surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya.
- 18) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup.
- 19) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak.
- 20) Surat ijin dari pemerintah negara asal COTA yang dilegalisir Kementerian Luar Negeri setempat.
- 21) Persetujuan dari keluarga COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut.
- 22) Laporan sosial mengenai CAA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak.
- 23) Surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah sakit/kepolisian/masyarakat anak ke Instansi Sosial.
- 24) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Kepada Lembaga Pengasuhan Anak.
- 25) Laporan sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial.
- 26) Surat Keputusan Ijin Asuhan yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial RI tentang pemberian ijin pengasuhan sementara.
- 27) Laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai perkembangan anak selama diasuh sementara oleh COTA.
- 28) Foto CAA dan bersama COTA
- 29) Surat keputusan Tim PIPA tentang pertimbangan ijin pengangkatan anak.
- 30) Surat keputusan Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang pemberian ijin pengangkatan anak untuk diproses lebih jauh dipengadilan.
- 31) Penetapan pengadilan bahwa status CAA sebagai anak terlantar.

Dalam prakteknya apabila COTA beragama Islam, maka harus ada (dua) persyaratan administratif yang menjadi tambahan yaitu:⁶⁰

1. Surat pernyataan tidak akan menjadi wali apabila anak angkatnya akan menikah (apabila calon anak angkat berjenis kelamin perempuan).

⁶⁰ Imam Supriyadi, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar 24 Agustus 2016

2. Surat pernyataan akan memberikan hibah kepada anak angkatnya.

Menjadi perhatian bahwa persyaratan administratif COTA berupa lembaran fotocopy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) Permensos No.110/HUK/2009.

Semua dokumen yang akan dipergunakan di luar negeri termasuk dokumen pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing terlebih dahulu dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM dan setelah itu oleh Kementerian Luar Negeri, begitu juga terhadap dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia, dokumen harus dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri dan setelah itu oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Persyaratan material dan administratif harus terpenuhi untuk melakukan proses pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Persyaratan administratif tersebut akan terpenuhi apabila Kementerian Sosial telah memberikan ijin agar proses pengangkatan anak dapat dilanjutkan, serta Pihak Kementerian Sosial telah mengetahui motivasi dari COTA warga negara asing mengajukan permohonan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak di Lembaga Pengasuhan anak dapat dilakukan apabila COTA sudah mengunjungi Kementerian Sosial dan sudah mendapat ijin dari Kementerian Sosial c.q. Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak untuk melakukan proses pengangkatan anak. Tata cara pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial R.I. No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. COTA datang ke yayasan yang diberi wewenang untuk menjelaskan/

memberi keterangan/konsultasi tentang cara-cara pengangkatan anak dan dokumen-dokumen apa yang harus dipenuhi. Konsultasi oleh Pihak Yayasan dilakukan agar COTA dapat menjelaskan secara detail motivasi pengangkatan anak yang dilakukan. Motivasi pengangkatan anak oleh COTA warga negara asing diharapkan hanya hanya memandang dari segi kepentingan terbaik bagi anak, bukan dari segi kepentingan orang tua angkatnya. walaupun dalam kehidupan nyata proses pengangkatan anak ini berdampak untuk keduanya baik anak maupun orang tua angkatnya.

2. Pihak Yayasan akan melakukan wawancara kepada COTA, wawancara ini dimaksudkan agar Pihak Yayasan mendapat keyakinan bahwa COTA dapat melakukan tugas untuk memelihara dan melindungi anak. Wawancara ini dilakukan lebih detail dari wawancara atau konsultasi di Kementerian Sosial. Hal ini karena Yayasan sangat memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Apapun alasan atas motivasi pengangkatan anak COTA semua harus memperhatikan kepentingan anak, kehidupan si anak kelak baik sosial dan pendidikannya.
3. Apabila Pihak Yayasan setuju dan mendapat keyakinan dari jawaban atas wawancara dengan COTA warga negara asing maka Pihak Yayasan akan menyatakan setuju proses pengangkatan anak dilanjutkan. Pihak Yayasan meminta agar COTA memenuhi persyaratan materil dan administratif untuk pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengangkatan anak. Cota harus mengirimkan fotocopy dokumen kepada Kementerian Sosial R.I. dan Menteri Sosial telah memberi disposisi untuk menyetujui proses selanjutnya.
4. Setelah surat/dokumen lengkap, Pihak Yayasan akan memohon kepada Pihak Kementerian untuk mengadakan kunjungan rumah pertama (*Home*

Visit I). Menteri c.q. Direktorat Pelayanan Sosial Anak membuat surat tertulis kepada Yayasan untuk melakukan *home visit I*. Setelah surat tertulis keluar, Menteri c.q Direktorat Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial melakukan *Home Visit I* kepada keluarga COTA untuk melakukan penilaian kelayakan COTA. Pekerja Sosial yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerja sosial dalam pengangkatan anak (Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007).

5. Setelah diadakan *home visit I*, maka Pekerja Sosial Kementerian dan Pekerja Sosial Yayasan akan membuat Laporan Sosial COTA, yang diketahui oleh pejabat Kementerian dan Yayasan. Laporan sosial COTA ini adalah penilaian kelayakan calon orang tua angkat secara ekonomi, sosial, psikologis, budaya, kesehatan dan sebagainya dengan catatan:
 - a. Apabila dalam laporan sosial COTA dinyatakan layak sebagai orang tua angkat maka Pihak Yayasan akan mengajukan surat kepada Menteri Sosial untuk dikeluarkannya surat ijin pengasuhan anak.
 - b. Apabila dalam laporan sosial COTA dinyatakan tidak layak sebagai orang tua angkat, maka Pihak Yayasan akan mengajukan surat kepada Menteri Sosial untuk menolak permohonan calon orang tua angkat dalam melakukan permohonan angkat.
6. Apabila dalam Laporan Sosial COTA dinyatakan layak oleh Pekerja Sosial maka Lembaga Pengasuhan Anak yaitu yayasan akan membuat ijin tertulis ke Menteri Sosial untuk mengeluarkan surat ijin pengasuhan

anak sementara. Dalam hal ini Direktorat Pelayanan Sosial Anak atas nama Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Ijin Pengasuhan Anak Sementara kepada COTA melalui Lembaga Pengasuhan Anak (Pasal 46 ayat (1b) Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009).

7. Setelah ijin pengasuhan anak sementara diberikan Kementerian Sosial, pihak yayasan akan menyerahkan anak kepada COTA untuk dilakukan *Foster Care* (Asuhan Anak) selama 6 (enam) bulan. *Foster Care* dilakukan agar calon anak angkat mulai memiliki hubungan sosial dengan calon orang tua angkat sebelum benar-benar sah menjadi anak angkatnya. Ijin asuhan sementara akan dicabut apabila COTA melalaikan kewajibannya. Pekerja Sosial akan melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan anak sementara.
8. Setelah lebih kurang 6 (enam) bulan, Pihak Yayasan akan memohon kepada Kementerian Sosial untuk melakukan kunjungan rumah kedua (*Home Visit II*). Setelah adanya persetujuan dari Kementerian Sosial, maka Pekerja Sosial akan melakukan kunjungan rumah kedua (*home visit II*). *Home visit II* dilakukan untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat dalam asuhan calon orang tua angkat. Pekerja sosial akan menilai apakah calon orang tua angkat dan calon anak angkat dapat menyatu atau tidak.
9. Berdasarkan kunjungan kedua (*home visit II*) Pekerja Sosial akan membuat Laporan Sosial yang berupa perkembangan anak selama lebih kurang 6 (enam) bulan dengan catatan:
 - a. Apabila dalam laporan sosial calon orang tua angkat layak

sebagai orang tua angkat maka pihak yayasan dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial untuk dibahas di sidang Tim PIPA (Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak).

- b. Apabila dalam laporan sosial tersebut calon orang tua angkat tidak layak melakukan pengangkatan anak maka yayasan dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menarik kembali pangajuan permohonan anak yang sudah ada dalam pengasuhan sementara calon orang tua angkat dan calon anak angkat akan ditarik kembali untuk diserahkan kepada Lembaga Pengasuhan Anak.

10. Setelah adanya Laporan Sosial Perkembangan Anak yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat layak menjadi orang tua angkat, Pihak Kementerian yaitu Direktorat Pelayanan Sosial Anak akan membahas penilaian kelayakan COTA dan memeriksa serta meneliti berkas /dokumen permohonan pengangkatan anak dengan Tim PIPA. Tim PIPA adalah Tim yang memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam memberikan ijin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing atau pengangkatan anak yang salah satu calon orang tua angkat warga negara asing atau pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial No. 37/HUK/ 2010 Tentang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Pusat disebutkan bahwa sidang Tim PIPA dihadiri oleh instansi-instansi terkait, yaitu:

- (1) Kementerian Sosial RI.
- (2) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- (3) Kementerian Luar Negeri RI.

- (4) Kementerian Hukum dan HAM.
- (5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (6) Kementerian Kesehatan RI.
- (7) Markas Besar Polri.
- (8) Kementerian Dalam Negeri RI.
- (9) Kementerian Agama RI.
- (10) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- (11) Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.

Sidang Tim PIPA dilaksanakan untuk menelaah dan meneliti serta memberikan pertimbangan atas permohonan ijin pengangkatan anak. Anggota Tim PIPA yang hadir memberikan tanggapan sesuai Tupoksi masing-masing berkas COTA.

11. Setelah diadakan sidang Tim PIPA, maka akan diputuskan proses pengangkatan anak disetujui oleh Tim PIPA atau tidak. Apabila proses pengangkatan anak disetujui oleh Tim, maka Tim PIPA akan mengeluarkan Surat Keputusan Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak, yang berupa surat rekomendasi dari Tim PIPA tentang Perijinan Perimbangan Pengangkatan Anak.
12. Setelah Tim PIPA mengeluarkan surat rekomendasi tentang perijinan pengangkatan anak, surat tersebut akan dikirim kepada Menteri Sosial. Surat rekomendasi ini dijadikan oleh Menteri Sosial untuk mengeluarkan surat ijin pengangkatan anak. Apabila Menteri Sosial merasa bahwa proses pengangkatan anak disetujui maka Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial akan mengeluarkan Surat Ijin pengangkatan anak, yang akan digunakan untuk ditetapkan di pengadilan. Surat Ijin dari Menteri Sosial tersebut digunakan COTA untuk mengajukan proses ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sesuai

keinginan COTA. Proses pengangkatan anak di atas menjelaskan bahwa sebelum COTA mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan, COTA harus mempunyai Surat Ijin dari Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagai surat rekomendasi untuk dilakukannya pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan.

c. Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri

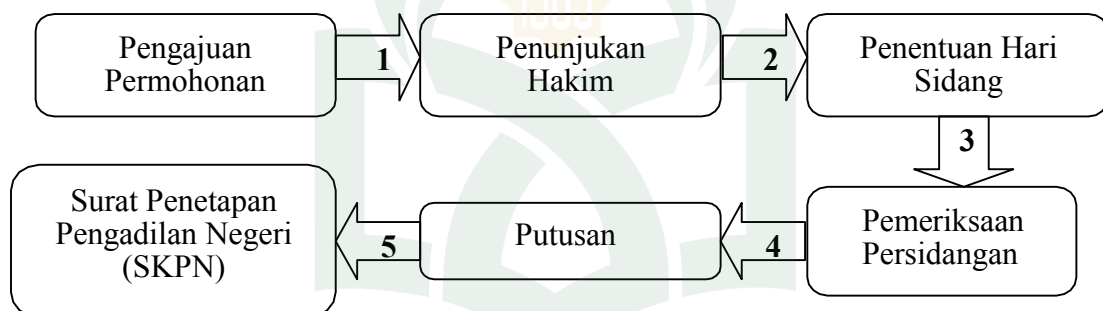
Penetapan Pengadilan adalah faktor penentu bagi pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Indonesia merupakan salah satu negara yang setuju dengan *European Conventional On The Adoption Of Children*, yang antara lain menetapkan bahwa pengangkatan anak antar negara (*Inter State, Inter Country Adoption*) dianggap sah atau sah sifatnya apabila dinyatakan oleh Pengadilan. Dengan kata lain penetapan atau putusan pengadilan merupakan syarat *esensial* bagi sahnya pengangkatan anak (SEMA No. 6 Tahun 1983).

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dengan adanya *The European Convention on the Adoption of Children*, telah memaksa diambilnya tindakan antisipasif terhadap kemungkinan terjadinya *intecountry adoption* dan sekaligus memberikan inspirasi bagi Indonesia. Dalam kaitan ini Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 dan No. 4 Tahun 1989 menegaskan bahwa *intercountry adoption* harus merupakan *ultimum remidium* atau upaya terakhir apabila tidak didapatkan orang tua angkat dari Indonesia sendiri, dan bahwa *intercountry adoption* harus disahkan melalui Penetapan Pengadilan.

Dalam Surat Edaran JHA/1/1/2 Tahun 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing dijelaskan bahwa:

- a. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri.
- b. Tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri.

Apabila Surat Rekomendasi dari Menteri Sosial telah diterima oleh COTA warga negara asing, maka proses selanjutnya dapat diteruskan yaitu permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri. Lebih singkatnya akan dijelaskan dengan bagan sebagai berikut:



Prosedur Pengesahan Permohonan Pengangkatan Anak

Sumber: Data diolah

Prosedur pengesahan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri sesuai dengan bagan di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. COTA datang mengajukan permohonan kepada Pihak Pengadilan Negeri. Tentang permohonan pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang tua warga negara asing (*Intercountry Adoption*) diatur dalam Surat Edaran No. 6 Tahun 1983. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga

negara asing, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Syarat dan bentuk permohonan,

Syarat dan bentuk permohonan pengangkatan anak tersebut bersifat *voluntair*. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan pengangkatan anak juga dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan tertulis. Permohonan dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Dalam hak mendapat pendampingan, pemohon/calon orang tua angkat harus tetap hadir dalam pemeriksaan dipersidangan. Permohonan yang diajukan harus dibubuhi materai secukupnya. Permohonan COTA dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili anak warga negara Indonesia.

b) Isi Surat Permohonan

Dalam bagian dasar hukum dari permohonan secara jelas diuraikan dasar yang mendorong diajukannya permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Dalam permohonan harus jelas bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak warga negara Indonesia yang bersangkutan, dan harus digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan terjadi. Dalam surat permohonan, isi petitum harus bersifat tunggal yaitu tidak disertai (*in samenloop met*) petitum yang lain.

2. Setelah permohonan yang diterima maka dilanjutkan dengan penunjukan hakim.

3. Hakim yang ditunjuk langsung menentukan hari sidang, pihak pengadilan akan menghubungi pihak pemohon untuk memberitahu jadwal sidang.
4. Pada hari sidang akan dilakukan pemeriksaan persidangan dimana bukti dan saksi-saksi akan diperiksa. Pemeriksaan di depan pengadilan dijelaskan dalam Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 jo. Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak. Dalam memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak di persidangan diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pengadilan Negeri mendengar langsung

Dalam persidangan Pengadilan Negeri harus mendengar langsung penjelasan dari beberapa pihak yaitu:

- (1) Calon orang tua angkat warga negara asing (suami-isteri) dan orang tua kandung warga negara Indonesia (jika ada).
 - (2) Badan/Yayasan Sosial yang telah mendapat izin dari Kementerian Sosial/Pejabat Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak tersebut.
 - (3) Seorang pejabat/petugas Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak warga negara Indonesia dimohonkan untuk diangkat oleh orang tua angkat warga negara asing.
 - (4) Calon anak angkat warga negara Indonesia kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
 - (5) Petugas/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk memberi penjelasan tentang status imigratur dari calon anak warga negara Indonesia dan/ atau calon orang tua angkat warga negara asing.
 - (6) Pihak kepolisian setempat.
- b) Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang menjadi bahan permohonan atau pertimbangan putusan,

diantaranya:

- (1) Surat-surat resmi tentang kelahiran anak angkat warga negara asing, seperti akta lahir, dan akta-akta lain yang diperlukan.
- (2) Surat-surat keterangan, laporan sosial, pertanyaan pertanyaan, yang sudah ada sebelum permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri.
- (3) Surat keterangan dari kepolisian tentang calon orang tua angkat warga negara asing tersebut telah berada dan bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan calon anak angkat warga negara Indonesia tersebut.
- (4) Surat-surat resmi tentang pribadi calon orang tua angkat warga negara asing, surat yang dimaksud meliputi:
 - a) Surat nikah calon orang tua angkat.
 - b) Surat lahir calon orang tua angkat.
 - c) Surat keterangan kesehatan.
 - d) Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan calon orang tua angkat (suami-isteri).
 - e) Persetujuan atau ijin untuk mengangkat anak Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal orang tua angkat.
 - f) Surat keterangan atas dasar penelitian *Sosil Worker* dari Instansi/Lembaga Sosial yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat warga negara asing;
 - g) Surat pernyataan calon orang tua angkat warga negara asing bahwa mereka tetap berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri/Perwakilan RI setempat walaupun anak tersebut telah memperoleh kewarganegaraan orang tua angkat warga negara asingnya.
- c) Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan mengarahkan pemeriksaan di persidangan maksudnya adalah Pengadilan Negeri ingin mengetahui beberapa hal dari pemeriksaan di persidangan tersebut diantaranya;
 - (1) Memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/ motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak angkat warga negara Indonesia termasuk Badan/Yayasan Sosial darimana anak angkat warga negara Indonesia tersebut berasal, atau pihak orang tua angkat warga negara asing.
 - (2) Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam

kesungguhan, ketulusan, dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut, Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.

- (3) Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua calon orang tua angkat tersebut.
 - (4) Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua orang tua angkat warga negara asing tersebut.
 - (5) Untuk memperoleh keterangan dari pihak Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, dan Kepolisian setempat.
 - (6) Untuk mengadakan pemeriksaan di mana calon anak angkat warga negara Indonesia berada.
5. Setelah Hakim merasa cukup dan tidak ada keberatan dari permohonan maka akan dibacakan putusan. Putusan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing adalah berupa **“PUTUSAN”** bukan **“PENETAPAN”** seperti permohonan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia. Disebut Putusan karena jenis permohonan ini sama dengan sistematika putusan dalam perkara gugatan perdata yang terdiri dari dua bagian yaitu “Tentang Jalannya Kejadian dan Tentang Pertimbangan Hukum”. Sedangkan, dalam pengangkatan anak antar warga negara Indonesia disebut sebagai Penetapan. (Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 Bagian V. Putusan Terhadap Permohonan-Permohonan Pengesahan/ Pengangkatan Anak). Bunyi amar penetapan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

MENETAPKAN

- 1) Menyetakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama: Remi Pierre Lanz alamat Jl. Telaga Utama No. 15 Taman Kayangan dan Yunita Upa Baroh alamat Jl. Telaga Utama No.15 Taman Kayangan terhadap anak perempuan bernama Sarah Audrey Layrends umur/tanggal lahir 6 bulan/ 29 November 2011
- 2) Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Dalam putusan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing ada bagian pertimbangan hukum, dimana dalam bagian ini disebutkan pertimbangan dan penilaian tentang:

- 1) Motif yang mendasari latar belakang mengapa di satu pihak melepaskan anak dan di lain pihak mengapa ingin mengadakan pengangkatan.
- 2) Keadaan kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga (apakah rumah tangga yang bersangkutan dalam keadaan harmonis), cara-cara pendidikan yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua yang bersangkutan.
- 3) Kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang melepaskan serta kesadarannya akan akibat-akibatnya setelah pengangkatan itu terjadi.
- 4) Kesungguhan, ketulusan, serta kerelaan pihak yang mengangkat maupun kesadarannya akan akibat-akibat yang menjadi bebannya setelah pengangkatan terjadi.
- 5) Kesan-kesan yang diperoleh Pengadilan tentang kemungkinan hari depan calon anak angkat warga negara Indonesia yang bersangkutan, terutama bila mana anak warga negara Indonesia diangkat oleh orang tua angkat warga negara asing dipahami anak tersebut akan lepas dari jangkauan Pemerintah RI.

Amar putusan Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang tua angkat warga negara asing sebagai berikut:

MENGADILI :

- 1) Menetapkan anak perempuan bernama Sarah Audrey Layrends umur/tanggal lahir 6 bulan/ 29 November 2011 di Makassar sebagai anak angkat dari suami isteri alamat Remi Pierre Lanz dan Yunita Upa Baroh, bertempat tinggal di Jalan Telaga Utama No.15 Taman Kayangan warga negara asing
- 2) Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar **Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)**
6. Setelah putusan dibacakan maka dikeluarkanlah Surat Putusan Pengadilan. Salinan putusan permohonan pengesahan pengangkatan anak dikirimkan kepada pihak-pihak Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman, Dirjen. Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan, dan Kepolisian. Pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.

Hal-hal tersebut yang menjadi dasar apakah permohonan pengesahan pengangkatan anak diterima atau tidak. Apabila permohonan sesuai dengan hal-hal tersebut maka permohonan dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksaan di muka persidangan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Ada beberapa catatan dalam pemeriksaan di persidangan yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan dalam SEMA No. 6 Tahun 1983, yaitu:

1. Terutama dalam pengangkatan seorang anak warga negara Indonesia, oleh orang tua angkat warga negara asing diperlukan adanya jaminan dan kepastian yang menyakinkan bahwa hari kemudian dari anak yang akan diangkat tersebut akan lebih baik

dari keadaan sekarang.

2. Jangan dilupakan agar diteliti bahwa calon anak angkat harus berumur di bawah 5 (lima) tahun / belum berumur 5 (lima) tahun.
3. *Intercountry adoption* merupakan *ultimum remedium* karena kepentingan dan martabat bangsa menjadi taruhannya. Sehingga jangan sampai *intercountry adoption* merugikan martabat dan kepentingan negara.

Selain catatan pemeriksaan di persidangan di atas, perlu perhatian terhadap umur calon anak angkat. Dimana dalam SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 disebutkan bahwa calon anak angkat yang diangkat oleh warga negara asing adalah anak-anak yang umurnya belum mencapai 5 (lima) tahun. Sedangkan, dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Pasal 42 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 menyebutkan bahwa syarat calon anak angkat adalah

1. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
3. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Berdasarkan penjelasan usia calon anak angkat maka tidak menutup kemungkinan pengangkatan anak dilakukan bagi anak-anak yang usianya diatas 5 (lima) tahun.

d. Pencatatan Pengangkatan Anak di Catatan Sipil Pusat

Setiap proses pengangkatan anak yang ditetapkan atau diputus Pengadilan Negeri harus dicatatkan di Pencatatan Sipil, demikian pula pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Dalam

akhir putusan Pengadilan Negeri, sudah diperintahkan agar Salinan Putusan Pengadilan Negeri dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari penjelasan di lapangan diketahui bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri bisa dikirim sendiri oleh warga negara asing atau bisa juga dikirimkan oleh Pihak Pengadilan.

Pencatatan Pengangkatan Anak di Pencatatan Sipil diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 yaitu:

- a. Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- b. Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud diatas wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- c. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Proses pencatatan pengangkatan anak di catatan sipil harus membawa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Salinan Putusan Pengadilan tentang pengangkatan anak.
- 2) Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan (Asli dan foto copy).
- 3) Kartu Keluarga Pemohon dan KTP Pemohon.
- 4) Penduduk WNA membawa dokumen imigrasi, SKLD dari Kepolisian, dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan.
- 5) Penduduk WNA Tinggal Terbatas membawa SKTT dan Penduduk WNA Tinggal Tetap membawa KK dan KTP.
- 6) Surat Kuasa Pengisian Biodata bermaterai Rp. 6.000,- bagi yang dikuasakan dan fotocopy KTP Penerima Kuasa.

Tata cara pencatatan pengangkatan anak dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan point-point di atas dijelaskan bahwa pertama pemohon mengisi formulir pengangkatan anak, lalu menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak kepada Instansi pelaksanaan dengan melengkapi persyaratan yang telah dijelaskan di atas. Setelah penyerahan formulir maka pihak instansi pelaksana akan menerima dan memverifikasi formulir pelaporan beserta persyaratannya. Apabila semua dokumen tidak ada masalah, maka instansi pelaksana akan mencatat dan merekam data kedalam data base. Pencatatan data ke dalam data base berarti proses pemberian catatan pinggir pada register akta kelahiran dapat dilakukan. Setelah selesainya pemberian catatan pinggir maka proses pencatatan pengangkatan anak telah selesai. Pihak Instansi Pelaksana akan menyerahkan kembali kutipan akta kelahiran kepada pemohon.

C. Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Baso Rasyid, dijelaskan bahwa: “Setelah adanya putusan pengadilan, ada hal-hal baru yang timbul terhadap anak, baik dalam hal status hubungan keluarga ataupun kewarisannya, juga termasuk kewarganegaraannya apabila anak diangkat orang asing. Kalau status hubungan keluarga. Jelas bahwa anak sudah tidak memiliki hubungan dengan orang tua biologis, sejak putusan dibacakan status anak berubah menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya. Berbeda dengan putusan di Pengadilan Agama, kalau di Pengadilan Agama status anak tetap menjadi anak kandung orang tuanya, dan orang tua angkat hanya sebagai pemeliharaan saja. Kewarisan terhadap anak angkat juga begitu, apabila diputus di Pengadilan Negeri maka hak waris anak angkat sama dengan hak waris anak kandung, sedangkan di Pengadilan Agama, anak angkat hanya mendapat $\frac{1}{3}$ dari hak anak kandung, apabila orang tua angkat ingin membagi dengan hak yang sama maka orang tua

angkat harus memberikan hibah kepada anak angkat. Sedangkan kewarganegaraan anak yang diangkat oleh orang asing, anak angkat memiliki 2 (dua), kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan orang tua angkat sampai si anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Tetapi dalam hal waris orang tua angkat bisa mewaris berdasarkan hukum negaranya”.⁶¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut penulis setelah adanya putusan Pengadilan, ada hal-hal baru yang timbul terhadap anak, baik dalam hal status hubungan keluarga ataupun kewarisannya. Berikut akibat hukum yang bisa timbul:

1. Status Kewarganegaraan

Anak angkat warga negara Indonesia, akan memiliki 2 (dua) kewarganegaraan. Sebelum anak angkat mencapai umur 18 (delapan belas) tahun anak angkat dapat berstatus kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan asing asal negara orang tua angkatnya. Tetapi setelah 18 (delapan belas) tahun, anak angkat bisa memilih kewarganegaraan yang diinginkannya..

2. Kewarisan

- a. Apabila anak angkat dan orang tua angkat beragama Islam, serta diputuskan di Pengadilan Agama, maka kewarisannya memakai hukum Islam. Jelas ditentukan dalam Hukum Islam bahwa anak angkat hanya berhak menerima 1/3 (sepertiga) dari hak waris anak kandung. Sehingga dalam hal ini, kebijakan dari orang tua angkat untuk membagi warisannya agar memiliki hak sama dengan dengan pemberian hibah.
- b. Apabila anak angkat dan orang tua angkat beragam Non-Islam, serta putusan berasal dari Pengadilan Negeri, maka kewarisannya memakai

⁶¹ Baso Rasyid (52 Tahun), Panitera Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 23 Agustus 2016.

hukum Perdata Barat. Dimana anak angkat berhak mendapat hak waris yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Karena kedudukan anak kandung dan anak angkat adalah sama.

- c. Dalam hak kewarisan orang tua angkat bisa memakai hukum atau peraturan sesuai keinginan dan kewarganegaraannya

3. Perwalian

- a. Anak angkat tetap berstatus anak angkat, karena dalam hukum Islam tidak diperbolehkan memutus hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya.
- b. Bagi anak angkat adalah perempuan beragama Islam, orang tua angkat tidak boleh menjadi wali kawin apabila anak angkat akan melakukan perkawinan.
- c. Anak angkat yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri memutus hubungan anak dengan orang tua kandung. Walaupun si anak tetap memiliki hak mengetahui siapa orang tua kandungnya.

Dalam pengangkatan anak bukan saja syarat-syarat untuk adopsi yang berbeda, tetapi akibat-akibat hukum pun berbeda. Dalam prakteknya pengangkatan anak digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁶²

- a. *Adoptio plena*, yaitu pengangkatan anak yang syaratnya berat, dan akibat hukum berpengaruh banyak. Pengangkatan anak tersebut memutus hubungan hukum anak angkat dengan orang tua biologisnya, serta melanjutkannya dengan orang tua angkatnya. Akibat hukumnya, anak tersebut memiliki hak waris orang tua angkat dan tidak lagi memiliki hak waris dari orang tuakandungnya.
- b. *Adoptio minus plena*, yaitu pengangkatan anak yang syaratnya

⁶² Sudargo Guatama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian 1*, (Bandung: Alumni, 1991), h. 138

gampang dan akibat hukum tidak terlalu berpengaruh banyak. Pengangkatan anak tersebut hanya bertujuan memelihara anak dan tidak memutus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat.

Pada dasarnya pengangkatan anak adalah berubahnya status anak angkat menjadi anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya. Hal ini mengakibatkan putusnya hubungan orang tua kandung dengan anak (*adoptio plena*). Akan tetapi, apabila pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Agama maka akibat hukum yang terjadi adalah *adoptio minus plena*, karena telah jelas disebutkan bahwa Hukum Islam melarang pengangkatan anak dan melarang akibat hukum yang memutus hubungan dengan orang tua kandung. Walaupun sebelum pelaksanaan pengangkatan anak tersebut calon orang tua angkat sudah melewati dan memenuhi persyaratan yang ketat. Hal ini dimaksudkan agar kesejahteraan anak angkat dapat terjamin, karena tujuan utama pengangkatan anak adalah kepentingan terbaik bagi si anak. Penulis akan menjabarkan akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak khususnya pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing dari berbagai aspek, yaitu:

a. Status kewarganegaraan

Prinsipnya Indonesia menganut asas *ius sanguinis* yaitu hak kewarganegaraan yang diperoleh oleh seseorang berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Jadi, untuk warga yang orang tuanya telah menjadi warga negara Indonesia, maka dia otomatis menjadi warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 memang tidak dibenarkan seseorang memiliki 2 (dua) kewarganegaraan. Tetapi untuk anak-anak ada pengecualian,

dengan catatan setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun dia harus memilih status kewarganegaraannya.

Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 6 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana disebut dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 akibatnya anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”.

Berdasarkan bunyi Pasal 6 yang telah disebutkan di atas maka dijelaskan anak yang mendapat kewarganegaraan ganda adalah:

- 1) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing (Pasal 4 huruf c, UU No. 12 Tahun 2006).
- 2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia (Pasal 4 huruf d, UU No. 12 Tahun 2006).
- 3) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin (Pasal 4 huruf h, UU No. 12 Tahun 2006).
- 4) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada yang bersangkutan (Pasal 4 huruf l, UU No. 12 Tahun 2006). dan
- 5) Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia (Pasal 5 ayat (2), UU No. 12 Tahun 2006).

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing mengakibatkan anak angkat memiliki 2 (dua) kewarganegaraan atau *dual citinez* sampai anak angkat berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan bisa memilih kewarganegaraannya sendiri.

وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ يَدْعُونَ مَا نَكحُ آبَاؤُكُمْ مِّنَ الذَّلِيلِ مَاقَدَ سَلَفٍ لَّكُنْ فَاِحِدَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ٢٢ خُذْ عَلَيْكُمُ امَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوكُمُ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَخَوَالَاتُ الْأَخِ وَامَّهَاتُ الْأَخِ وَخَالَاتُ
الْأَخِ وَامَّهَاتُ الْأُمِّاتِ وَنِسَاءَ الْأُمِّاتِ وَرَبَّائِبُكُمْ لِتَمْنِي فِي دُجُورِكُمْ
مِّنْ نِّسَائِكُمُ الْبَنَاتِ فَلَمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاحَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ لَا يُلِدْنَ إِلَّا بِمَا قَدْ
 سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٣١

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (22) Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (23) ⁶³

c. Kewarisan

Di Indonesia, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional memiliki ketentuan hak waris, ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat. Di Indonesia tidak ada yang menjelaskan tentang hak kewarisan bagi anak angkat warga negara Indonesia yang di angkat oleh orang tua angkat warga negara asing akan tetapi, berdasarkan putusan pengadilan, maka diketahui hukum kewarisan mana yang akan dipakai, yaitu

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 113.

1) Putusan Pengadilan Negeri

Pengangkatan anak yang diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, akibat hukum dalam kewarisannya dijelaskan berdasarkan Hukum Barat, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Akibat hukum tersebut ditentukan dalam Staatsblad 1917 No. 219 Bab II Pengangkatan Anak, sebagai berikut:

- (1) Pasal 11: “anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi”.
- (2) Pasal 12 ayat (1): “anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekwensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi”.

2) Putusan Pengadilan Agama

Pengangkatan anak yang diputus berdasarkan putusan Pengadilan Agama, anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui lembaga wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan. Sehingga dalam hukum Islam, anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Oleh karena berbeda-bedanya akibat hukum terhadap kewarisan di setiap daerah atau negara, dan tidak adanya peraturan yang mengatur secara pasti hak anak angkat dalam warisan, maka dalam hal kewarisan anak warga negara Indonesia oleh orang tua angkat warga negara asing dapat memakai hukum yang ada di

negaranya, karena anak angkat masih memiliki 2 (dua) kewarganegaraan.

Satu hal yang harus wajib dilakukan orang tua angkat, setelah adanya putusan pengadilan yaitu yang dijelaskan dalam Pasal 40 UU Perlindungan Anak, yaitu:

1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
2. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Dari bunyi pasal diatas jelas bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat maupun penetapan pengadilan tidak diperbolehkan memisahkan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya yang bertujuan antara lain untuk mencegah kemungkinan terjadinya perkawinan sedarah. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak angkat, maka orang tua angkat wajib memberitahukan asal-usul serta orang tua kandung dari anak angkat dengan mempertimbangkan kesiapan mental anak.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing (*intercountry adoption*) adalah sebagai berikut:

Seharusnya dilakukan sesuai prosedur pengangkatan namun dalam kenyataan terdapat kasus dimana pengangkatan anak tersebut tidak sesuai ketentuan prosedur pengangkatan anak yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Akibat hukum yang timbul akibat pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing adalah sebagai berikut:

Pertama, status kewarganegaraan ganda sampai usia 18 tahun. Kedua, menjadi wali nikah bagi anak perempuan tetap orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. Ketiga, bagi yang beragama muslim tetap mewaris dari orang tua kandungnya dan dari orang tua angkatnya hanya mendapat hibah, jika non muslim maka hak waris atas anak tersebut beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dan kedudukannya sama dengan anak kandung orang tua angkatnya. Keempat, Keagamaan dari anak angkat.

B. Implikasi Penelitian

Dalam hal pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing, Pemerintah harus lebih selektif dalam pemberian izin pengangkatan anak. Para pihak yang terkait khususnya Lembaga Pengasuhan Anak harus teliti tentang

motivasi COTA warga negara asing melakukan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak. Perlu adanya Lembaga Pengawasan Anak yang rutin memantau keadaan anak yang di adopsi oleh warga Negara asing sehingga hak-hak anak tidak dilanggar, khususnya bagi anak-anak yang dibawa ke negara asal orang tua angkat. walaupun dalam persyaratan orang tua angkat warga negara asing harus melaporkan perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun di Kedutaan Besar atau Perwakilan RI di Negara kediaman orang tua angkat berada. Pihak pemerintah juga khususnya Kementerian Sosial RI perlu meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum yang mungkin terjadi sesuai dengan peraturan yang ada. Karena masih adanya terdapat pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddun. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ahmad, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Brannen, Julia. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Akademika Pressindo Gautama, 1991.
- Sudargo. *Hukum Pedata Internasional Indonesia*, Jilid III, Bagian I. Bandung: Alumni, 1995.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Koesoemo, Soeyaniati. *Pelaksanaan Pengangkatan Dan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Fortun Mandiri Karya, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Martosedono, Amir. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang: Effhar Offset Semarang, 1990.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Tafal, Bastian. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta: C.V. Rajawali, 1983.
- Wignjoipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995.
- YLBHI dan PSHK. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

B. Skripsi

Vidyawati, Solekha. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Universitas Negeri Semarang. 2013.

Vidyawati, Solekha. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Universitas Negeri Semarang, 2013.

Hildawati Tambunan, Fransiska. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*)", *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

C. Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 37/HUK/2010 Tentang TIM Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak;

- Surat Edaran JHA/1/1/2 Tahun 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing.
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).





LAMPIRAN - LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

FORMAT PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI :

H a l : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi
Ilmu Hukum
Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Di

Samata-Gowa

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. IRFANDI
NIM : 10500112098
Semester/Klpk : VIII (Delapan) / B
Angkatan : 2012

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

- Acc 11/2/2016
Muh. Irfandi
1. Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)
 2. Analisis Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)
 3.

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. *Wassalamu Alaikum Wr. Wb*

11, Februari 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Pemohon,



(Istiqamah, SH. MH)
NIP. 196801120 199503 2 001

(Muh. Irfandi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 275 Tahun 2016
TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAFT/SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : 1. **Dr.M.Thahir Maloko .M.Hi**
: 2. **Erlina. SH.,MH**

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Muh.Irfandi Syukur

N I M : 10500112098

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara Asing atas Putusan No.79/PDT./P/2012/PN.MKS.**

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 13 Juni 2016



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muh. Irfandi Syukur**, Nim. **10500112098**, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **"Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing"**. Memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 30 November 2016

Pembimbing I



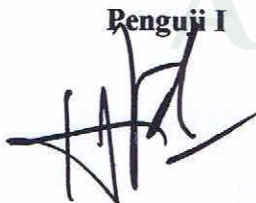
Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi
NIP. 19631231 199503 1 002

Pembimbing II



Erlina, S.H., M.H
NIP. 19691219 200501 2 003

Penguji I



Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, M.A
NIP. 194604231 196512 1 001

Penguji II



Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H
NIP. 19711020 199703 1 002

DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
SEMESTER 9 (SEMBILAN) WISUDA PERIODE DESEMBER
TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Nama : MUH INFANDY SYUKUR
NIM : 10500112098
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENGAUNGKATAN ANAK WARNA NEGAR INDONESIA OLEH WARNA NEGARA ACING

NILAI MATA KULIAH				JUMLAH RATA-RATA
MKDU	MKDK	MKPP	KESELURUHAN	
(Dirasah Islamiyah)	(Fikih/Ushul Fikih)			
4	4	3	11	3,67

Samata, 25 / 10 / 2016



Kasubag
Akademik dan Kemahasiswaan

RI SURYANI, S. Sos., MM.
NIP / 19661019 199503 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)
Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/1040/2016
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 18 Agustus 2016

Kepada
Yth. **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar**

Di-
Makassar

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Muh. Irfandi Syukur
N I M : 10500112098
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Pannampu No. 16 A

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.Adapun Judul Skripsi yaitu :

**“ Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia
Oleh Warga Negara Asing “**

Dengan dosen pembimbing:

3. **Dr. M. Thahir Maloko., M.HI**
4. **Erlina, SH.,MH**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2016 s/d 22 September 2016

Demikian harapan kami dan terimakasih.
Wassalamu 'AlaikumWr.Wb



Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

Jalan R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : info@pn-makassar.go.id, pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

LEMBAR DISPOSISI KEPANITERAAN

Tanggal dan nomor surat : 18 Agustus 2016 / SI.1 / PP.00.9 / 1540 / 2016
Asal Surat : UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Sifat Surat : Biasa/Penting/Rahasia
Isi Ringkasan : Permohonan izin penelitian
Atv. Muh. Isfandi Syukur.

No. Reg. Surat : 8679 Tgl : 22 Agustus 2016

Instruksi/informasi Ketua/Wakil Ketua ditujukan kepada : 1. Wakil Ketua

2. Hakim/Majelis Hakim

3. Panitera

4. Wakil Panitera

5. Panitera Muda Hukum

6. Panitera Muda Perdata

7. Panitera Muda Pidana

8. Panitera Muda Niaga

9. Humas

10. Panitera Muda PHI.

11. Panitera Muda TIPIKOR

12.

Panitera diteruskan Kepada :

1. Wakil Panitera

2. Panitera Muda Hukum

3. Panitera Muda Perdata

4. Panitera Muda Pidana

5. Panitera Muda Niaga

6. Humasp

7. Panitera Muda PHI

8. Panitera Muda TIPIKOR

9.

Tanggal terima :

Pelaksana :



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 25 Agustus 2016

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ *207* /HKM/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

BASO RASYID, SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MUH. IRFANDI SYUKUR

NIM : 10500112098

Fakultas/Jurusan : Syar'iah dan Hukum / Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Pannampu No. 16 A Makassar

Judul Penelitian : "TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK
WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA
NEGARA ASING".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016, dan telah dibimbing oleh :

1. IMAM SUPRIYADI, SH.,MH

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tanggal 18 Agustus 2016 Nomor : SI.1/PP.00.9/1940/2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA *f*

BASO RASYID, SH.MH
NIP.196112101982031007

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 668 Tahun 2016
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca

: Surat Permohonan :
N a m a : Muh. Irfandi Syukur
N I M : 10500112098
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Selasa, 6 Desember 2016
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Indonesia oleh
Warga Negara Asing"

Menimbang

- : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menti Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 c Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalm Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istqamah, S.H, M.H
Penguji I : Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, M.A
Penguji II : Ashabul Kahfi, S.Ag, M.H
Pelaksana : 1. Dra. Andi Masniah
2. Nurjannah

Ujian Munaqasyah/Skripsi

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

: Samata
: 1 Desember 2016

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MUH. IRFANDI SYUKUR, S.H, dilahirkan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 04 Maret 1994. Merupakan anak ke delapan dari delapan bersaudara dari pasangan H. Abd Syukur Saleh dan Hj. Sohrah Yusuf. Karier pendidikan penyusun dimulai tahun 2000 – 2006 di SD Hang

Tuah Makassar, kemudian pada tahun itu juga penyusun melanjutkan pendidikan Tsanawiyah di Pondok Pesantren An Nahdlah Makassar pada tahun 2006 – 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di Aliyah di Pondok Pesantren An Nahdlah Makassar pada tahun 2009 – 2012. Pada tahun 2012 penyusun melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Fakultas Syariah dan Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Perdata. Penyusun menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R